

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman masyarakat tentang gender hingga saat ini ternyata belum sepenuhnya benar. Hal itu dapat diketahui pada saat melakukan aktivitas sosialisasi gender baik di lingkup pemerintah maupun masyarakat. Banyak orang beranggapan bahwa gender itu identik dengan perempuan bahkan ada yang berpendapat bahwa gender itu sama dengan jenis kelamin. Oleh karena itu masih diperlukan upaya untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang arti gender yang sebenarnya.

Gender berasal dari bahasa Latin “genus” berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena dibentuk oleh sosial dan budaya setempat maka gender tidak berlaku selamanya tergantung waktu (tren) dan tempatnya. Gender ditentukan oleh sosial budaya setempat sedangkan seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran dan tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Gender dan kodrat tidak dapat disamakan.

Kodrat biasa dikenal sebagai seks yakni perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan dalam sistem reproduksi seperti organ kelamin (penis, testis dengan vagina, rahim dan payudara), hormon yang dominan dalam tubuh (estrogen dan testosteron), kemampuan untuk memproduksi sperma atau ovarium, kemampuan untuk melahirkan dan menyusui. Dengan demikian maka gender masih bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan seks atau jenis kelamin tidak bisa dipertukarkan karena sudah kodrat dari Tuhan.

Profil gender Kota Semarang ini ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai situasi gender di Kota Semarang dengan maksud memberikan pemahaman kepada mereka yang buta gender yang ditandai dengan ketidakmampuan mengenali adanya perbedaan/ketidaksetaraan/ketidakadilan gender dalam berbagai hal/fenomena. Gender sebagai penentu utama atas pilihan-pilihan hidup yang ada. Sementara masyarakat yang lebih sensitif gender yakni

memiliki kepekaan bahwa ketidaksetaraan gender dapat menimbulkan ketidakadilan sosial.

Masyarakat yang sensitif gender akan menjadi masyarakat yang mawas gender, yaitu masyarakat yang mempunyai cara pandang bahwa konstruksi gender dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan kebijakan publik. Dengan mawas gender maka masyarakat akan peduli gender, mau berperan aktif dalam berbagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di masyarakat.

Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat akan tetapi terdapat kemiripan yang mencolok. Misalnya saja hampir di semua kebudayaan menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan kepada laki-laki.

Sebagaimana halnya ras, etnik dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras dan etnis namun semuanya mengalami diskriminasi gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun kesadaran masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UU No 7 Tahun 1984 Kesepakatan Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Konvensi ini diadopsi berbagai negara yang diimplementasikan dalam produk undang-undang mereka guna menghapuskan kekerasan dan meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. PUG merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan.

Kemudian pada tahun 2012 Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB meluncurkan pembangunan berkelanjutan yang diberi nama, "Sustainable Development Goals"

(SDGs). Agenda Pembangunan Berkelanjutan memiliki makna penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Sasaran global agenda pembangunan berkelanjutan antara lain :

- a. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun
- b. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya
- c. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan
- d. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat
- e. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.

Seperti diketahui bersama isu gender selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai pengambilan keputusan dalam pembangunan. Masalah utama yang dihadapi adalah miskinnya ketersediaan data terpilah khususnya data gender secara memadai. Persoalan ini makin kompleks manakala penyedia data pembangunan selama ini kurang memperhatikan pentingnya data terpilah sebagai dasar penyelenggaraan penganggaran.

Oleh karena itu penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2021 menjadi terobosan untuk menyediakan data yang baik terkait dengan situasi gender di Kota Semarang.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2021 tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia-8 Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama

- Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);I-9
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 17. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162); Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
 19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraanl-10 Sistem Data Gender Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Profi Gender Kota Semarang Tahun 2021 dimaksudkan memberikan gambaran dan informasi mengenai gender secara akurat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengarusutamaan gender.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2021 adalah

- a. Memberikan gambaran pelaksanaan PUG di Kota Semarang.
- b. Memberikan gambaran permasalahan dan rekomendasi dalam perspektif gender.
- c. Menyediakan data gender.

D. Output

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Profil Gender Kota Semarang Tahun 2021.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan mengenai situasi gender di Kota Semarang
2. Melakukan identifikasi data terpilah yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan gender di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, serta kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang
3. Melakukan analisis permasalahan pembangunan gender.

F. Sistematika Akhir Laporan

Sistematika laporan akhir Profil Gender Kota Semarang Tahun 2021 sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, output dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan
- BAB II Gambaran Umum Kota Semarang, berisi tentang kondisi pembangunan di Kota Semarang meliputi kondisi geografis, demografis dan Pembangunan Gender
- BAB III Metode pelaksanaan pekerjaan
- BAB IV Penyajian Data Gender Kota Semarang
- BAB V Analisa Data Gender Kota Semarang
- BAB VI Penutup, Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Gender

1. Pengertian Gender

Dalam beberapa dekade terakhir ini upaya penyadaran gender menjadi perbincangan serius tidak hanya di kalangan aktivis perempuan namun juga keluarga-keluarga, politisi, wartawan. Perbincangan dilakukan karena banyaknya kejadian dalam masyarakat yang bias gender sehingga merugikan perempuan maupun masyarakat secara keseluruhan. Upaya penyadaran dilakukan dengan harapan membantu perempuan sendiri menemukan jati dirinya dan peran kontekstual di tengah masyarakat yang terus berubah.

Yang selalu menarik ditanyakan adalah kapan upaya penyadaran gender dimulai? Sudah jamak kita sadari bersama kita hidup dalam budaya, pandangan dan ideologi yang didominasi patriarki. Di tengah masyarakat figur laki-laki kerap menjadi sosok sentral. Penelitian menunjukkan masa-masa bayi dalam kandungan terbukti paling bagus untuk menginternalisasikan nilai-nilai keakraban antara anak dan orang tua. Penelitian menunjukkan masa bayi dalam kandungan terbukti paling bagus menginternalisasikan nilai-nilai keakraban dengan orang tua. Penelitian menunjukkan bayi dalam kandungan sudah mampu menangkap detak jantung orang tuanya, bereaksi dengan sapaan ayahnya serta mengarahkan perhatian pada rangsangan yang diberikan. Kalimat-kalimat yang mengandung sapaan bias gender yang diberikan orang tuanya akan terekam dalam otak anak sejak dalam kandungan. Sapaan bias gender sebenarnya tanpa disadari dilakukan kebanyakan orang tua seperti, “Nak, besok kalau kamu lahir laki-laki akan saya ajak ke kebun binatang, tetapi kalau perempuan akan saya ajak ke pasar”. Ungkapan itu mempertegas adagium seperti selama ini terjadi bahwa pasar, dapur, sumur, kamar tidur merupakan area perempuan. Sementara sawah, ladang, kebun binatang, kantor adalah dunia publiknya laki-laki.

Di pihak lain gerakan feminis dan pemberdayaan gender sering dianggap sebagai anti laki-laki, anti keluarga dan anti mengasuh anak. Timbulnya kekerasan akhir-akhir ini salah satunya disebabkan oleh ketidakseimbangan relasi gender dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena perempuan hanya sebagai kapital dalam proses transformasi sosial ekonomi. Disamping itu persoalan emansipasi kerap dipersempit

melulu diwarnai dengan gugatan absesnnya perempuan dalam dunia politik, hukum, kedokteran dan industri. Pada saat yang sama perempuan hanya cenderung dilihat sebagai korban dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perempuan bukan menerima saja kenyataan hidup. Kesalahan utama yang dilakukan banyak pihak adalah mereproduksi struktur patriarkhi dengan menekankan wacana ketimpangan gender, perempuan sebagai makhluk lemah tergantung dan halus.

Cara semacam ini justru kontraproduktif dengan upaya peningkatan kesetaraan perempuan, sebaliknya tersubordinasi secara terus-menerus oleh wacana orang-orang yang ingin membantu perempuan. Masalah yang dihadapi perempuan masa kini kian kompleks rumit karena pada saat bersamaan harus ada dimana-mana. Menjadi sangat rumit mengharapkan perempuan memainkan berbagai peran sekaligus. Ada kecenderungan menjadikan perempuan sebagai superwoman sekaligus.

Gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku. Secara kodrat memang diakui ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yaitu dalam aspek biologis. Perbedaan biologis senantiasa digunakan untuk menentukan relasi gender, seperti pembagian status, hak-hak, peran, dan fungsi di dalam masyarakat. Padahal gender yang dimaksud adalah mengacu pada peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial¹. Pengertian gender menurut Muhtar (2002), bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sementara Dr. Mansour Fakih mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan cultural².

Oakley, ahli sosiologi Inggris, merupakan orang yang mula-mula memberikan perbedaan istilah gender dan seks³. Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang terkait dengan sifat, status, posisi dan perannya dalam masyarakat. Istilah seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan adanya

¹Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan : Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi, Jakarta : Teraju, 2004, hlm. 3

²Dr. Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, hlm 8

³Ahmad Baidowi, Tafsir Feminis, Bandung : Nuasa, 2005, hlm. 30

sperma dan penis serta perempuan dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, vagina dan payudara. Ciri jenis kelamin secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen dan tidak dapat dipertukarkan

Ditinjau dari aspek kehidupan, gender mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lembah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa⁴.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa istilah gender merujuk pada nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Nilai-nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan dapat dipertukarkan. Itu terjadi karena gender tidak melekat pada jenis kelamin tetapi pada pelabelan masyarakat.

2. Sex (Jenis Kelamin Biologis)

Konsep seks atau jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, pada perbedaan tubuh antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dikemukakan oleh Moore dan Sinclair (1995 : 117). "*Sex refers ti biological deferencer between man and woman, the result of differences in the chromosomes of the embro*". Definisi konsep seks tersebut menekankan pada perbedaan yang disebabkan perbedaan kromosom pada janin. Sebagaimana dikemukakan oleh Keshtan 1995, jenis kelamin bersifat biologis dan dibawa sejak lahir sehingga tidak dapat diubahkecuali dengan operasi. Alat-alat tersebut menjadi dasar seseorang dikenali jenis kelaminnya sebagai perempuan atau laki-laki.

Pengertian seks atau jenis kelamin secara biologis merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, bersifat permanen (tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan), dibawa sejak lahir dan merupakan pemberian Tuhan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Melalui penentuan jenis kelamin secara biologis ini maka dikatakan bahwa seseorang akan disebut berjenis kelamin laki-laki jika ia memiliki penis, jakun,

⁴Soeroso, Moerti Hadiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspetif Yuridis-viktimologis, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 15

kumis, janggut dan memproduksi sperma. Sementara seseorang disebut berjenis kelamin perempuan jika ia mempunyai vagina dan rahim sebagai alat reproduksi, memiliki alat untuk menyusui (payudara) dan mengalami kehamilan dan proses melahirkan. Ciri-ciri secara biologis ini sama di semua tempat, di semua budaya dari waktu ke waktu dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain.

3. Peran Gender

Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status lingkungan, budaya dan struktur masyarakat. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang dipersiapkan sebagai peran perempuan dan laki-laki. Empat jenis peran dalam gender yaitu :

a Peran Gender

Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang dipersepsikan sebagai peran perempuan dan laki-laki. Peran laki-laki dan perempuan dibedakan atas peran produktif, reproduktif dan sosial.

b Peran Produktif

Peran produktif merujuk kepada kegiatan yang menghasilkan barang dan pelayanan untuk konsumsi dan perdagangan (Kamla Bhasin, 2000). Semua pekerjaan di pabrik, kantor, pertanian dan lainnya yang kategori aktivitasnya dipakai untuk menghitung produksi nasional bruto suatu negara. Meskipun perempuan dan laki-laki keduanya terlibat di dalam ranah publik lewat aktivitas produktif, namun masyarakat tetap menganggap pencari nafkah adalah laki-laki. Contoh di sebuah kantor, bila terjadi PHK maka seringkali perempuanlah yang dikorbankan karena dianggap kegiatan laki-laki yang menghasilkan uang.

Bila merujuk pada definisi kerja sebagai aktivitas yang menghasilkan pendapatan baik dalam bentuk uang maupun barang maka aktivitas perempuan dan laki-laki baik di sektor formal maupun informal, diluar rumah atau di dalam rumah sepanjang menghasilkan uang atau barang termasuk peran produktif. Contoh peran produktif perempuan yang dijalankan di dalam rumah misalnya usaha menjahit, catering, salon dan yang lain. Contoh peran produktif yang dijalankan di luar rumah sebagai guru, buruh, pedagang dan pengusaha.

c Peran Reproduksi

Peran reproduktif dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu biologis dan sosial. Reproduksi biologis merujuk kepada melahirkan seorang manusia baru, sebuah aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Reproduksi sosial merujuk kepada semua aktivitas merawat dan mengasuh yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan bertahanya hidup. Dengan demikian, aktivitas reproduksi ialah aktivitas yang mereproduksi tenaga kerja manusia. Merawat anak, memasak, memberi makan, mencuci, membersihkan, mengasuh dan aktivitas rumah tangga lainnya masuk dalam kategori ini. Dalam artian peran reproduktif adalah peran-peran yang dijalankan tidak menghasilkan uang dan biasanya dilakukan di dalam rumah. Walaupun hal-hal tersebut penting untuk bertahanya hidup manusia, aktivitas tersebut tidak dianggap sebagai pekerjaan atau aktivitas ekonomi sehingga tidak terlihat, tidak diakui dan tidak dibayar. Kerja reproduksi biasanya dilakukan oleh perempuan, baik dewasa maupun anak-anak di kawasan rumah domestic.

Pertanyaannya mengapa peran reproduksi secara alamiah menjadi tanggung jawab perempuan. Jawaban yang sering muncul adalah karena perempuan melahirkan maka merawat, memelihara anak menjadi tanggungjawabnya. Perlabelan tersebut menjadi sirna bila mengerti apa itu seks/jenis kelamin dan apa itu gender. Laki-laki pun melakukan peran reproduktif, baik reproduktif biologis (membuahi) dan reproduktif sosial karena memelihara anak dan mengasuh anak tidak menggunakan rahim.

d Peran Sosial (Kemasyarakatan)

Peran perempuan untuk mengatur atau mengorganisir masyarakat teridentifikasi lebih bersifat memberikan layanan dan menjadi bagian dari kerja reproduktif, misalnya pelayanan kesehatan di Posyandu, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kebudayaan (kerja bakti, gotong royong, pembuatan jalan kampung, dll). Peran kemasyarakatan yang dijalankan perempuan ini digunakan bersama dan bersifat sukarelawan. Sedangkan peran sosial yang dilakukan laki-laki biasanya pada tingkatan masyarakat yang diorganisasikan, misalnya menjadi RT, RW, Kepala Desa.

4. Perbedaan Seks dan Gender

Menurut Kementerian Peranan Wanita (Nasution, 2015) istilah sex (jenis kelamin) konsentrasi pada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormone tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologi lainnya. Sementara gender lebih menekankan pada aspek sosial, budaya psikologi, dan aspek non biologis lainnya.

Sementara itu, Tim Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah⁵ membedakan seks dan gender sebagai berikut :

- a Bias gender perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dengan pembedaan peran dan posisi sebagaimana realita yang ada pada dunia dewasa ini tidak akan menjadimasalah selama itu adil. Namun pada kenyataannya yang ada perbedaan peran tersebut membatasi gerak keduanya sehingga melahirkan ketidakadilan. Terlebih kepada perempuan, dalam realitas yang ada, banyak sekali kejadian yang merujuk pada ketidakadilan terhadap perempuan. Seorang anak perempuan diasumsikan tidak perlu sekolah tinggi, tidak perlu pendidikan lanjut karena pada ujungnya hanya berputar pada pekerjaan domestic saja. Pada akhirnya perempuanlah yang menjadi korban ketidakadilan gender bermula dari adanya kesenjangan gender dalam berbagi aspek kehidupan terutama dalam akses terhadap pendidikan dan ekonomi. Menurut Fikih (1998), bias gender adalah suatu system dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari system tersebut. Ketidakadilan gender tersebut terdapat di berbagai wilayah kehidupan, yaitu dalam wilayah negara, masyarakat, organisasi atau tempat kerja, keluarga dan diri sendiri. Dalam pengertian positif yang ingin dicapai adalah keadilan gender.
- b Keadilan gender adalah proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Agar proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki secara berbeda. Oleh karena itu, keadilan gender tidak berfokus pada perlakuan yang sama tetapi lebih mementingkan pada kesetaraan sebagai hasilnya.

Menurut Fakih (2008) bias gender tersebut dapat berbentuk subordinasi, marginalisasi, stereotip, kekerasan terhadap perempuan, dan beban kerja ganda.

⁵Tim Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut saling terkait dan berpengaruh satu dengan lainnya. Adapun bentuk ketidakadilan gender adalah sebagai berikut :

1. Subordinasi, artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin terlebih utama atau lebih penting dari yang lain. Dengan kata lain sebuah posisi atau peran yang merendahkan nilai peran yang lain.
2. Marjinalisasi (peminggiran) artinya suatu upaya peminggiran terhadap pembatasan akses dan perampasan hak dari salah satu kelompok gender. Sebagai contoh anak perempuan diarahkan sekolah guru, perawat atau sekretaris. Ironisnya pekerjaan tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan lain yang bersifat maskulin.
3. Beban ganda, artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Masuknya perempuan di sector public tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga. Peran ganda tetap harus dijalankan baik di domain public maupun domestic. Akibat dari perbedaan sifat dan peran maka semua pekerjaan domestic dibebankan kepada perempuan, tuntutan ekonomi keluarga selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, perempuan juga harus bekerja di kebun, ke pasar mencari nafkah bagi keluarga. Akibatnya perempuan memiliki beban kerja ganda, bahkan sering dituduh mengabaikan tanggungjawab di dalam rumah tangga dan juga tidak berprestasi di dunia public. Ketidakadilan tampak ketika sekalipun curahan tenaga kerja dan waktu cukup panjang ternyata dihargai rendah dibandingkan pekerjaan public.
4. Stereotype artinya pemberian lebel atau cap yang dikenakan kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan atau pandangan terhadap suatu kelompok/seks tertentu yang sering kali bersifat negative dan secara umum melahirkan ketidakadilan. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan yang sering dijumpai adalah pelabelan negative yang ditujukan kepada perempuan. Misalnya, perempuan suka berdandan, dianggap untuk menarik perhatian laki-laki. Dengan demikian cocok diberi tugas sebagai penerima tamu. Perempuan sebagai pendamping suami sehingga tidak perlu dipromosikan menjadi ketua atau kepala, sebab

dianggap bukan pencari nafkah utama yang akan menopang ekonomi keluarga. Perempuan dianggap cengeng, suka menggoda, sehingga tidak dapat dipercaya menduduki jabatan penting/strategis.

5. Kekerasan, artinya bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologi terhadap orang yang menjadi sasarannya. Indikasi bahwa perempuan mengalami kekerasan dapat dilihat dari contoh pemukulan terhadap istri, pelecehan seksual, eksploitasi seks terhadap perempuan yang masih tetap tinggi baik di dalam maupun diluar rumah.

A. Kesetaraan gender

Kesetaraan gender termuat dalam Lampiran Impres No.9 Tahun 2000, menyatakan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Gender ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidakadilan gender yang terjadi yang meliputi marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban kerja. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan saling terkait dan berpengaruh secara dialektik. Adanya studi gender padadasarnya bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan ketidakadilan gender tersebut. Dengan kata lain studi gender hendak mewujudkan keadilan sosial dan keadilan sosial tidak dapat diwujudkan tanpa adanya keadilan gender dalam masyarakat.

Keadilan gender biasanya merujuk pada aplikasi keadilan sosial dalam hal pemberian kesempatan yang sama antar laki-laki dan perempuan. Keadilan di sini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam segala hal, namun yang dimaksud adalah bahwa pemberian suatu kesempatan atau akses tidak tergantung pada perbedaan jenis kelamin. Keadilan gender dengan demikian dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta sama-sama dapat dinikmati hasil dari perkembangan itu.

Diantara gambaran dan indikasi adanya upaya untuk mewujudkan keadilan gender adalah :

- a Menerima dan memandang secara wajar perbedaan pada laki-laki dan perempuan karena adanya penghormatan pada perbedaan termasuk wujud dari ketidakadilan gender.
- b Mendiskusikan bagaimana cara merombak struktur masyarakat yang membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan, serta berupa menyeimbangkannya.
- c Meneliti kemampuan dan bakat masing-masing warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, memecahkan problem-problemnya dan mempersiapkan masa depannya.
- d Memperjuangkan secara terus menerus hak asasi manusia, dimana gender merupakan salah satu dari bagiannya yang tak terpisahkan
- e Mengupayakan perkembangan dan penegakan demokrasi dan pemerintah yang baik dalam semua institusi masyarakat, dengan melibatkan perempuan dalam semua levelnya.
- f Pendidikan merupakan kunci bagi keadilan gender, karena merupakan tempat masyarakat mentransfer norma-norma, pengetahuan, dan kemampuan mereka.

B. Perempuan dan Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang senantiasa menjadi isu penting bagi publik maupun individu termasuk di dalamnya kaum perempuan. Di Indonesia isu kesehatan merupakan salah satu persoalan yang diatur dalam konstitusi dan teralokasikan dalam anggaran negara yakni APBN dan APBD. Namun dalam berbagai penelitian menunjukkan begitu kompleksnya persoalan kesehatan publik maupun kesehatan berdasarkan gender dan kelompok usia.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) Kementerian Kesehatan, 2018 menyebutkan masalah gizi dan penyakit tidak menular merupakan pekerjaan terbesar di Indonesia. Kemenkes mengakui hanya mampu mengurangi angka stunting dari 37,2 persen menjadi 30,8 persen selama lima tahun. Gizi buruk hanya berkurang dari 19,6 menjadi 17,6 persen. Sementara angka obesitas justru mengalami peningkatan dari 14,8 persen menjadi 21,8 persen. Pada saat yang sama penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, gangguan ginjal kronis, diabetes hampir mengalami peningkatan.

Kondisi kesehatan di Indonesia juga dapat dilihat dari kondisi kesehatan keluarga dan kesehatan perempuan. Bidang kesehatan merupakan isu penting bagi gerakan perempuan dan studi feminis. Kaum feminis menemukan adanya kesenjangan dalam hubungan antara perempuan, kesehatan dan dunia medis. Pada gelombang kedua gerakan perempuan di seluruh dunia, kelompok feminis berjuang untuk mengangkat isu kesehatan perempuan ke permukaan. Dampak positif dari gerakan perempuan tersebut kita rasakan hingga hari ini semakin banyak perempuan yang berkiprah di bidang kedokteran dan meningkatnya perhatian sumber daya yang didedikasikan untuk isu kesehatan perempuan.

Di Indonesia isu kebijakan di bidang kesehatan juga menjadi perhatian gerakan perempuan. Persoalan angka kematian ibu misalnya telah menjadi fokus perhatian gerakan perempuan sejak beberapa dekade silam. Namun hingga hari ini masih menjadi persoalan genting yang tak kunjung teratasi. Kesehatan perempuan juga berhubungan dengan posisi perempuan sebagai subyek. Khususnya dalam persoalan kesehatan reproduksi, pengetahuan mengenai hak dan kesehatan seksual dan reproduksi sangat menentukan tidak hanya kondisi kesehatan fisik perempuan tetapi juga well-being perempuan. Sejumlah riset memperlihatkan nilai dan unsur budaya yang hidup dalam masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap keyakinan, keputusan, sikap dan perilaku masyarakat terkait kesehatan perempuan. Aspek konteks lokal perlu dipertimbangkan secara serius dalam seluruh upaya memperbaiki dan meningkatkan kesehatan perempuan. Selain itu pengalaman perempuan berhadapan dengan isu kesehatan hendaknya tidak ditempatkan sama dan universal. Sehingga para pengambil kebijakan dan tenaga kesehatan perlu memahami suara perempuan. Lebih dari itu kebijakan dan layanan kesehatan hendaknya memposisikan perempuan sebagai subyek yang berhak mengambil keputusan terkait kesehatannya.

C. Perempuan dan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal krusial bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan ditempuh dengan tujuan yang sama pula yakni memperoleh ilmu pengetahuan yang luas. Namun tak jarang saat ini masih ditemukan adanya stereotipe gender mengenai tidak pentingnya pendidikan yang tinggi bagi perempuan di sebagian masyarakat. Kerap terdengar stigma mengenai perempuan yang hanya akan mengurus rumah tangga sehingga pendidikan yang tinggi tidak

diperlukan. Hal itu tidak jarang membuat seorang perempuan semakin kehilangan motivasi, kepercayaan diri atas kesempatan dan tidak terlalu mementingkan pendidikan tinggi bagi dirinya. Lantas mengapa pendidikan tinggi penting bagi kaum perempuan?

Kesempatan pendidikan yang tinggi bagi perempuan sangat bermanfaat karena perempuan tidak sekedar mengurus rumah tangga namun juga madrasah pertama bagi anak-anaknya. Perempuan mengenal pendidikan pertama kali pada saat di keluarga bersama orang tuanya.

Perempuan berperan dalam menentukan generasi penerus bangsa yang terdidik. Karena pendidikan yang utama datang dari keluarga. Perempuan dengan latar belakang pendidikan tinggi akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berakarakter, berakhlak mulia dan berilmu tinggi. Dari sebab itu merupakan suatu stigma yang salah mengenai perempuan yang hanya akan mengurus rumah tangga tanpa perlu pendidikan tinggi. Di era perkembangan teknologi yang amat pesat terutama digitalisasi yang merambah semua bidang kehidupan, pendidikan tinggi menjadi penunjang utama kesuksesan.

Disamping itu sebagai seorang perempuan juga sangat wajib memiliki pengetahuan yang luas karena sejatinya perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan, khususnya di era yang maju saat ini, memiliki wawasan luas adalah keharusan. Pendidikan yang tinggi akan membentuk pola berpikir kritis yang berguna bagi perkembangan seseorang. Dengan berpikir lebih terbuka dapat memecahkan masalah dari berbagai sudut pandang, memutuskan sesuatu dengan tepat dan tidak mudah terpengaruh dengan cara pikir negatif.

Disamping itu pendidikan yang tinggi bagi perempuan diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan atau karier yang lebih layak. Di masa ini lulusan pendidikan tinggi sangat sulit mendapat pekerjaan dan bilapun ada kerap tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu latar belakang pendidikan yang tinggi adalah acuan yang sangat menentukan peluang bagi perempuan untuk bisa bersaing dengan banyaknya laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih terjamin.

D. Perempuan dalam Politik

Urgensi partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal penting diperhatikan. Dalam Preamble DUHAM dinyatakan, “Bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam PBB telah menegaskan

kepercayaan mereka pada hak-hak dasar manusia, akan martabat dan nilai seorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan. Pernyataan yang demikian mengandung pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dasar yang sama. Baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan dalam rangka mendorong kehidupan yang lebih baik.

Faktor selanjutnya rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan akan mendorong kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi kebijakan yang lebih adil dan responsif gender (Rahmaniah, 2016).

Hal ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goal (SDGs) yakni menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan ruang publik. Ketimpangan tidak boleh terjadi karena perempuan merupakan penghuni dari separuh populasi dari seluruh dunia (United Nations, 2014).

Dalam aspek politik keterlibatan perempuan dalam parlemen dan menduduki posisi di pemerintahan adalah bentuknya. Masalah dan persoalan-persoalan yang dialami perempuan dapat disuarakan dan diselesaikan, termasuk urusan kesejahteraan perempuan dipandang belum merata dan setara dengan laki-laki. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat kebijakan menerapkan minimal 30 persen untuk keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan akan mendorong kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi kebijakan yang lebih adil dan responsif gender.

Secara makro keberadaan perempuan dalam pemerintahan dan kepemimpinan dapat memberikan aspirasi bagi perempuan muda agar meningkatkan capaian pendidikannya. Perempuan sebagai kepala desa cenderung memprioritaskan investasi barang publik bagi kaumnya (Chattopadhyay & Duflo, 2004). Perempuan di kursi legislatif dapat menghasilkan hukum dan peraturan yang komprehensif membela kaumnya (Asiedu et al, 2007). Kepala negara perempuan cenderung meningkatkan IPM penduduknya dibandingkan dengan kepala negara laki-laki (Choudhary, 2010).

CEDAW yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk

Diskriminasi Terhadap Wanita pasal 1 memberikan ruang lingkup mengenai diskriminasi merupakan segala bentuk perbedaan, pengecualian dan pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang dapat menyebabkan kerugian bagi perempuan.

Pada tahun 1998 IULA Worldwide Declaration on Women in Local Governments turut mengevolusi pemikiran mengenai partisipasi perempuan kepada persatuan pemerintahan di seluruh dunia. Deklarasi ini begitu penting sebagai *“best position both to involve women in the making of decisions concerning their living conditions, and to make use of their knowledge and capabilities in the promotion of sustainable development”*. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang demokratis, setara dan berkelanjutan dimana peran perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan perlakuan sama dalam pelayanan.

Unescap menyajikan laporan perbandingan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan di berbagai negara. Angka keterwakilan perempuan di India 33,35%, Pakistan 33%, Bangladesh 33,3%. Sementara ada beberapa daerah yang keterwakilan perempuan cukup rendah seperti Thailand dan Malaysia di angka 32,5% dan 18%. Sedangkan di China 69% dan Selandia Baru 26%. Atas dasar pengalaman di Indonesia dan beberapa negara seharusnya perempuan lebih memungkinkan mengakses informasi dan rencana kebijakan. Sejauh ini hanya sedikit negara yang pemerintahnya mencapai keterwakilan perempuan seimbang dengan pengambil kebijakan. Maskulinitas pengambilan keputusan menyebabkan pemerintah kurang peka terhadap perbedaan dampak kebijakan terhadap laki-laki dan perempuan. Padahal Indonesia termasuk negara yang memiliki komitmen untuk memegang prinsip non diskriminasi, baik melalui hukum nasional dan beberapa kesepakatan internasional.

Representasi perempuan dan partisipasi yang setara dalam politik sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan dapat secara bebas menggunakan hak-hak mereka dan memenuhi potensi mereka tanpa terkendal. Kita percaya bahwa representasi dan partisipasi ini harus terus ditingkatkan dengan mempromosikan perempuan mengambil peran sentral dalam proses pengambilan keputusan strategis. Pada Pemilu 2019 dari 575 anggota parlemen 118 diantaranya adalah perempuan. Angka 17,32% ini merupakan yang tertinggi semenjak era parlementer yang pernah mencapai angka 21 persen.

Salah satu kendala partisipasi perempuan dalam politik ialah perempuan Indonesia umumnya tidak dianggap sebagai pengambil keputusan di tingkat keluarga atau

masyarakat. Sebuah jajak pendapat yang diunggah harian online Detik.com (Januari 2021) tentang sikap dan persepsi terhadap partisipasi sosial, ekonomi dan politik perempuan mengungkapkan bahwa 77,6% responden laki-laki dan perempuan percaya bahwa laki-laki harus menjadi pengambil keputusan di masyarakat.

Sementara 95% mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin keluarga dan 94% perempuan merasa bahwa perempuan tidak boleh bekerja tanpa izin dari suami. Bias gender dalam pengetahuan, sikap dan praktek di masyarakat terus ada di seluruh Indonesia dan menunjukkan perlunya memperluas pendidikan dan pelatihan gender untuk semua usia. Hingga tahun 2019 masih sulit bagi perempuan dan kelompok rentan yang mengalami intimidasi mendapatkan porsi yang setara. Perempuan yang memasuki kehidupan politik setelah mengurus keluarga dianggap tidak cocok memegang jabatan tinggi di bidang politik karena kurangnya pelatihan dan pengetahuan yang relevan. Karena perempuan tidak dapat mengakses sumber daya dan peluang ekonomis semudah laki-laki mereka harus berjuang untuk membiayai kampanye. Di pihak yang sama partai-partai politik khawatir kehilangan kekuasaannya, enggan untuk mendukung kandidat perempuan yang dianggap kurang terlatih atau kurang dana. Perempuan menghadapi diskriminasi karena dianggap menghadapi ancaman bagi politisi dan kandidat laki-laki, perempuan memiliki kekuatan yang dapat menarik pemilih termasuk bahwa perempuan memiliki integritas lebih. Kapasitas perempuan perlu diperkuat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

E. Perempuan dan Sosial Ekonomi

Berbagai kebijakan sejatinya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pencapaian kesetaraan gender dan mengurangi diskriminasi terhadap kaum perempuan. Namun hasilnya belum optimal. Kondisi ini diperparah dengan masalah kesenjangan antar wilayah di Indonesia, pada situasi seperti ini pemberdayaan perempuan di bidang sosial ekonomi menjadi penting. Dengan melihat kondisi ini pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik begitu penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan kualitas perempuan secara umum. Sayangnya tidak banyak penelitian yang secara khusus melihat hubungan pemberdayaan perempuan dan pengambilan keputusan di lingkup ekonomi dan politik terhadap IPM perempuan. Choudhary (2010) hanya melihat dampak perempuan sebagai kepala negara terhadap IPM perempuan. Rizqi dan Tusianti (2019) menganalisis pengaruh

pemberdayaan perempuan terhadap kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan dan ekonomi saja. Dalam bidang ekonomi, perempuan juga perlu diberi kesempatan untuk menduduki posisi pengambilan keputusan, baik sebagai pengusaha atau bagian tim manajerial. Memberikan akses kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam area publik, termasuk dunia kerja bermanfaat untuk pengembangan kapasitas perempuan itu sendiri juga untuk meningkatkan persaingan. Dengan kehadiran kaum hawa, maka dunia kerja lebih punya warna. Pasar tenaga kerja menjadi lebih kompetitif terutama dalam menghadapi globalisasi (Seguino, 2000, World Bank, 2011). Penelitian Klasen dan Lamana (2009) memperlihatkan bahwa ketimpangan dan kesempatan kerja menghambat pertumbuhan ekonomi yang hilang akibat ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan sekitar empat kali lebih besar dibandingkan ketimpangan gender dalam pendidikan. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi merupakan sebuah proses agar perempuan memiliki daya untuk menjadi “bread winner” sehingga mampu menghilangkan ketergantungan ekonomi dan melepaskan jerat kemiskinan (Elliott, 2008).

Sementara pemberdayaan dalam politik bermakna proses untuk meningkatkan ketertarikan perempuan dalam dunia politik dan berperan dalam pengambilan keputusan (World Bank, 2011). Pemberdayaan perempuan merupakan alat agar perempuan menjadi lebih berkualitas (Bappenas, 2019). Gunawan Sumodiningrat, (1999) tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan pendapatan perempuan yang masih berada di tingkat bawah sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia peranan perempuan dalam perekonomian semakin signifikan. Pada sektor Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM) 53,76% dimiliki perempuan dengan 97% karyawan adalah perempuan dan kontribusi dalam perekonomian 61%. di bidang investasi kontribusi perempuan mencapai 60%. Hal ini menggambarkan bahwa literasi dan kapasitas perempuan untuk berpikir cerdas, mengamankan dana untuk keluarga, menginvestasikan di bidang produktif sangat berkontribusi nyata. Dalam mendesain program pemulihan ekonomi, pemerintah pun kian melihat dimensi gender. Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, bantuan langsung tunai berhubungan dengan peran perempuan yang mengatur keuangan dalam rumah tangganya. Pada level internasional hasil statistik McKinsey menyatakan apabila perempuan berkontribusi dalam perekonomian, maka perekonomian global akan mendapatkan manfaat

sebesar US\$ 12 triliun pada tahun 2025, sedangkan khusus Asia Pasific dapat memberikan nilai tambah US\$ 4,5 triliun.

F. Perempuan dan Kekerasan

Laporan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkap bahwa sepertiga perempuan di dunia atau sekitar 736 juta dari mereka pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Meski secara umum kekerasan tidak berubah semenjak studi WHO kajian ini menunjukkan bahwa perempuan mengalami kekerasan sejak usia muda. Satu dari 4 wanita berusia 15-24 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan pasangan mereka. WHO pun menganalisis hasil survei di 161 negara antara tahun 2000-2018, risetnya menggambarkan kekerasan oleh pasangan sebagai bentuk pelecehan paling banyak dilaporkan. Di luar itu 6% perempuan mengatakan telah diserang oleh orang lain yang bukan pasangan atau suami mereka.

Di tanah air kekerasan terhadap perempuan berakar dari ketidak seimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Perempuan korban kekerasan menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak mereka atas keamanan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah global dan transnasional. Hal ini karena kekerasan terhadap perempuan terkait masalah hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan atau hambatan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial. Pada dasarnya kekerasan terhadap wanita disebabkan adanya budaya dominasi laki-laki (male domination culture) dalam kehidupan ini. Dalam struktur dominasi ini kekerasan seringkali digunakan laki-laki untuk menenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas terhadap sesuatu, untuk mencegah perbuatan mendatang dan semata-mata untuk mendemonstrasikan dominasi. Kekerasan terhadap wanita seringkali merupakan bentuk refleksi/pencerminan dari sistem patriarki. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dengan bentuknya yang kian beragam menjadikan kekerasan

terhadap perempuan sebagai masalah global (transnasional). Hal ini mestinya menjadikan negara-negara di dunia bekerjasama menanggulangi kekerasan terhadap wanita secara interdisipliner baik secara politis, sosial budaya dan ekonomi. Negara perlu menciptakan kondisi dimana laki-laki dan perempuan ditempatkan secara setara dalam posisi yang sejajar, sehingga tidak ada dominasi terhadap perempuan di segala bidang kehidupan.

BAB III

GAMBARAN KOTA SEMARANG

1. Sejarah Kota Semarang

Sejarah Kota Semarang berawal sekitar abad ke-8M, yaitu daerah pesisir yang bernama Pragota (sekarang menjadi Bergota) dan merupakan bagian dari kerajaan Mataram Kuno. Daerah tersebut pada masa itu merupakan pelabuhan dan di depannya terdapat gugusan pulau-pulau kecil akibat pengendapan yang saat ini masih terus terjadi.

Bagian bawah Kota Semarang dahulu merupakan lautan. Pelabuhannya diperkirakan di sekitar Pasar Bulu dan memanjang masuk ke Pelabuhan Simongan, tempat dimana armada Laksamana Cheng Ho bersandar pada tahun 1405M. Laksamana Cheng Ho mendirikan kelenteng dan masjid yang sampai sekarang masih dikunjungi wisatawan dan disebut Klenteng Sam Po Kong (Gedung Batu).

Pada akhir abad ke 15M seorang utusan Kerajaan Demak yaitu Pangeran Made Pandan menetap di daerah yang pada waktu itu menjadi semakin subur dalam mulai bermunculan pohon asam yang arang (bahasa Jawa : Asem Arang) sehingga nama daerah tersebut menjadi Semarang.

Kota Semarang saat ini menjadi ibukota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar ke lima di Indonesia. Sejak tahun 2013 hingga sekarang dipimpin oleh Walikota Hendrar Prihadi, S.E, M.M dan wakil wali kota Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu.

2. Kondisi Geografis

Kota Semarang terletak sekitar 558 km sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah barat Surabaya, atau 621 km sebelah barat daya Banjarmasin (via udara). Kota Semarang memiliki posisi astronomi diantara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}5'$ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni : koridor pantai Utara dengan panjang garis pantai sekitar 13,6 km; koridor Selatan ke arah koridor Merapi-Merbabu (Magelang-Surakarta)

koridor Timur yaitu arah Demak-Grobogan; arah Barat menuju Kabupaten Kendal.

Kota Semarang sendiri memiliki luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha yang terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Wilayah administratif kecamatan di Kota Semarang ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel
Wilayah Administratif Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1	Mijen	14	57.55
2	Gunungpati	16	54.11
3	Banyumanik	11	25.69
4	Gajah Mungkur	8	9.07
5	Semarang Selatan	10	5.93
6	Candisari	7	6.54
7	Tembalang	12	44.2
8	Pedurungan	12	20.72
9	Genuk	13	27.39
10	Gayamsari	7	6.18
11	Semarang Timur	10	7.7
12	Semarang Utara	9	10.97
13	Semarang Tengah	15	6.14
14	Semarang Barat	16	21.74
15	Tugu	7	31.78
16	Ngaliyan	10	37.99
	Kota Semarang	177	373.7

Sumber : BPS Kota Semarang, 2021

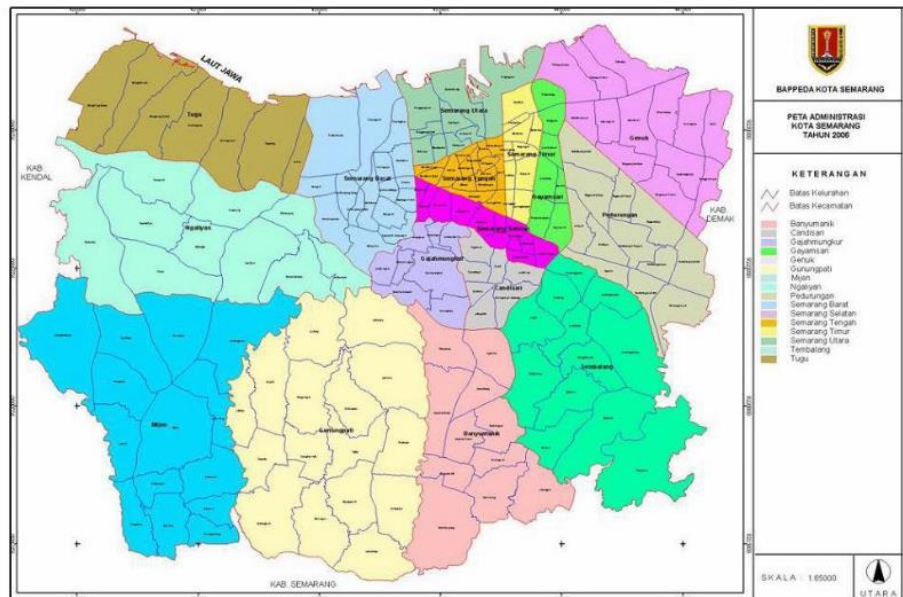
Daerah Semarang memiliki dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah di Kota Semarang sangat sempit, yakni sekitar 4 kilometer dari garis pantai. Dataran rendah ini dikenal dengan sebutan *kota bawah*. Kawasan kota bawah menjadi pusat kegiatan administrasi pemerintah Kota Semarang dengan adanya balai kota, gedung DPRD, Polda, destinasi wisata seperti Kota Lama dan

Lawang Sewu, pusat perkantoran dan lainnya. Tetapi daerah kota bawah seringkali dilanda banjir di sejumlah kawasan dan banjir ini sering disebabkan luapan air laut (rob). Dalam kurun waktu 5 tahun ini, banjir mulai dapat diatasi dengan dibangunnya sistem drainase kota yang baik dan revitalisasi dan normalisasi sungai Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, Sungai Tenggang, Sungai Sringin dan Sungai Babon sehingga mampu menekan bencana banjir yang terjadi.

Di sebelah selatan merupakan dataran tinggi, yang dikenal dengan sebutan *kota atas*, di antaranya meliputi Kecamatan Candi, Mijen, Gunungpati, Tembalang dan Banyumanik. Pusat pertumbuhan di Semarang sebagai pusat aktivitas dan aglomerasi penduduk muncul menjadi kota kecil baru. Seperti Kecamatan Banyumanik menjadi pusat pertumbuhan di Semarang atas, menjadikan daerah ini cukup padat. Fasilitas umum dan sosial yang mendukung aktivitas penduduk dalam bekerja maupun sebagai tempat tinggal juga telah terpenuhi. Banyumanik menjadi pusat pertumbuhan baru di Semarang bagian atas, dikarenakan munculnya aglomerasi perumahan di daerah ini.

Dahulunya Banyumanik hanya merupakan daerah sepi tempat tinggal penduduk Semarang yang bekerja di Semarang bawah (hanya sebagai *dormitory town*). Namun saat ini daerah ini menjadi pusat aktivitas dan pertumbuhan baru di Kota Semarang, dengan dukungan infrastruktur jalan dan aksesibilitas yang terjangkau. Fasilitas perdagangan dan perumahan baru banyak bermunculan di daerah ini, seperti Carefour, Mall Banyumanik, Ada Swalayan, Perumahan Banyumanik, Perumahan Pucang Gading, dan fasilitas pendidikan baik negeri maupun swasta, seperti Unnes, Undip, Polines, Unika, dll, dengan dukungan akses jalan tol dan terminal moda yang memperlancar transportasi.

Gambar. 1
Peta Kota Semarang



Sumber : RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021

3. KEPENDUDUKAN

Penduduk Kota Semarang sangat heterogen, yang terdiri dari campuran beberapa etnis Jawa, Cina dan Arab. Semarang juga memiliki komunitas Tionghoa yang cukup besar. Bahasa keseharian adalah Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, kemudian ada Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Kendati heterogen, namun kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang sangat damai. Toleransi kehidupan umat beragama sangat dijunjung tinggi.

Wilayah di Kota Semarang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki, dengan tingkat prosentase 50,49% untuk perempuan dan 49,51% untuk laki-laki. Hal ini ditunjukkan dari data dibawah ini :

Tabel
Jumlah Penduduk di Kota Semarang
Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota		Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kab./Kota	%
1	33.74	KOTA SEMARANG	835,404	4,951.00	851,818	50.49	1,687,222	100%
Jumlah Total			835,404	49,51%	851,818	50,49%	1,687,222	0.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2021

Gambaran jumlah penduduk Kota Semarang bila ditinjau per kecamatan dapat dilihat pada data dibawah ini.

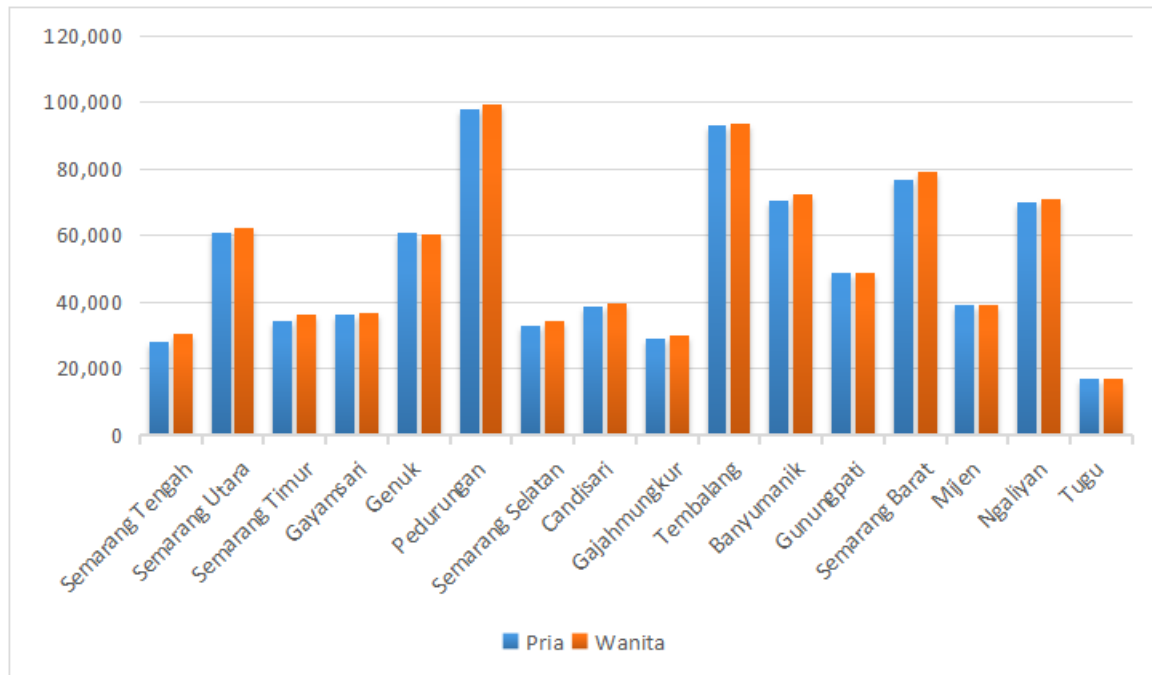
Tabel
Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kota Semarang
Tahun 2021

No	Kecamatan		Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	33.74.01	SEMARANG TENGAH	28,201	47.96%	30,596	52,04%	58,797	3,48%
2	33.74.02	SEMARANG UTARA	60,744	49.37%	62,285	50,63%	123,029	7,29%
3	33.74.03	SEMARANG TIMUR	34,546	48.68%	36,426	51,32%	70,972	4,21%
4	33.74.04	GAYAMSARI	36,188	49.59%	36,784	50,41%	72,972	4,32%
5	33.74.05	GENUK	61,055	50.21%	60,536	49,79%	121,591	7,21%
6	33.74.06	PEDURUNGAN	97,802	49.63%	99,257	50,37%	197,059	11,68%
7	33.74.07	SEMARANG SELATAN	33,086	48.93%	34,535	51,07%	67,621	4,01%
8	33.74.08	CANDISARI	38,793	49.3%	39,892	50,7%	78,685	4,66%
9	33.74.09	GAJAHMUNGKUR	29,252	49.33%	30,046	50,67%	59,298	3,51%
10	33.74.10	TEMBALANG	93,041	49.84%	93,649	50,16%	186,690	11,06%
11	33.74.11	BANYUMANIK	70,602	49.41%	72,283	50,59%	142,885	8,47%
12	33.74.12	GUNUNGPATI	48,718	49.87%	48,973	50,13%	97,691	5,79%
13	33.74.13	SEMARANG BARAT	76,870	49.2%	79,382	50,8%	156,252	9,26%
14	33.74.14	MIJEN	39,179	49.93%	39,289	50,07%	78,468	4,65%
15	33.74.15	NGALIYAN	70,257	49.76%	70,943	50,24%	141,200	8,37%
16	33.74.16	TUGU	17,070	50.19%	16,942	49,81%	34,012	2,02%
Jumlah			835,404	49,51%	851,818	50,49%	1,687,222	0.00
Jumlah Total			835,404	49,51%	851,818	50,49%	1,687,222	0.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2021

Bila ditunjukkan secara grafik jumlah penduduk Kota Semarang dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik
Jumlah Penduduk Kota Semarang dalam Gender
Tahun 2021



Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Pedurungan dengan jumlah 197.059 jiwa dengan persentase penduduk perempuan sebesar 50,37%; Kecamatan Tembalang dengan jumlah 186.690 jiwa dengan persentase penduduk perempuan sebesar 50,16%; Kecamatan Semarang Barat dengan jumlah 156.252 jiwa dengan persentase penduduk perempuan sebesar 50,8%.

Sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Tugu dengan jumlah 34.012 jiwa dengan persentase penduduk perempuan sebesar 49,81% lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki 50,19% di wilayah Tugu.

BAB IV

PROFIL GENDER

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.⁶

IPM diperkenalkan pertama kali oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Laporan tersebut menunjukkan klasifikasi sebuah negara sebagai negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Penghitungan dalam IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu : umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan dan standar hidup yang layak.

Ada 3 manfaat IPM, yaitu :

1. IPM sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia / penduduk,
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah / negara,
3. IPM menjadi data strategis yang bisa digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah

Menurut BPS tolak ukur skor IPM dibagi dalam 4 kelompok :

1. Sangat tinggi, skor IPM diatas 80
2. Tinggi, skor IPM antara 70 dan 80
3. Sedang, skor IPM antara 60 dan 70
4. Rendah, skor IPM dibawah 60

Merujuk pada standar yang berlaku dalam penghitungan skor IPM, maka Kota Semarang masuk dalam kategori IPM sangat tinggi, karena nilainya sudah diatas angka 80. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

⁶ <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>

Tabel
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang
Tahun 2020-2021

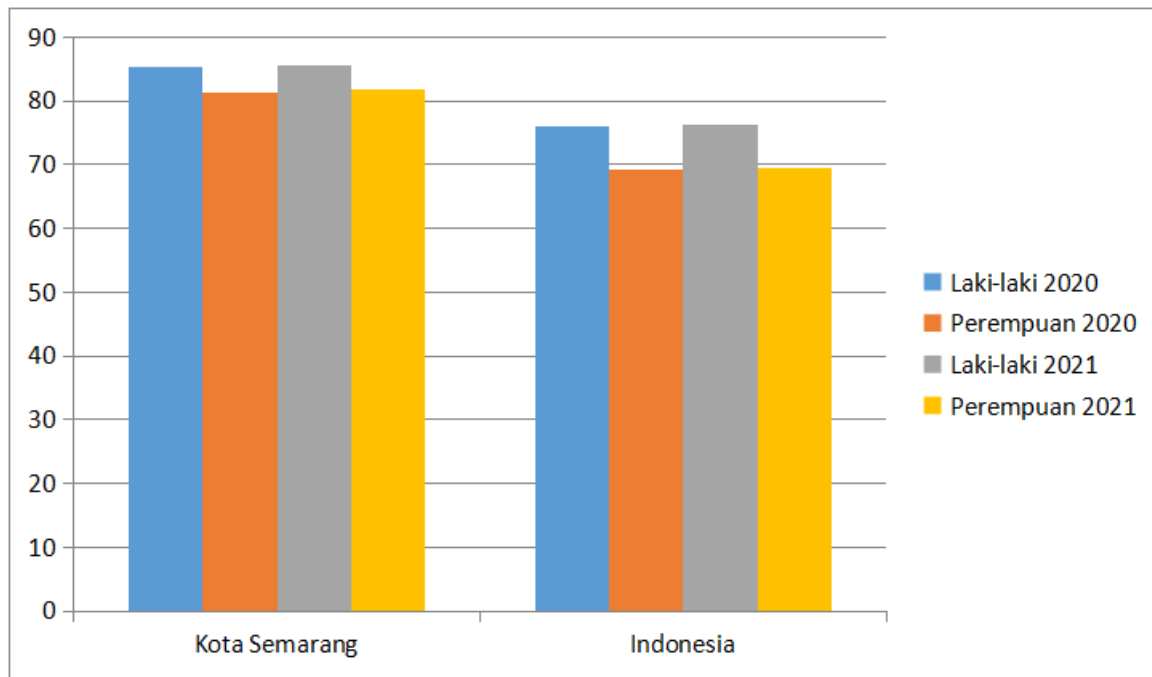
Wilayah	Laki-Laki		Perempuan	
	2020	2021	2020	2021
Kota Semarang	85,22	85,63	81,38	81,92
Demak	76,82	77,05	69,83	70,24
Kendal	75,82	76,02	70,66	70,93
Kab. Semarang	75,87	76,00	73,12	73,42
Indonesia	75,98	76,25	69,19	69,59

Sumber : BPS, 2021

Dari data BPS diatas untuk IPM Indonesia dan Kota Semarang menunjukkan masih adanya gap besaran angka IPM laki-laki dengan IPM perempuan yang mana lebih tinggi pencapaian laki-laki daripada perempuan. Ini menunjukkan masih terjadi kesenjangan dan realita di lapangan saat ini dimana perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki baik dibidang pendidikan, kesehatan, pendapatan / ekonomi dalam lainnya. Bisa juga dikatakan penduduk laki-laki masih lebih banyak mendapatkan manfaat hasil pembangunan daripada perempuan. Untuk Kota Semarang IPM laki-laki tahun 2020 sebesar 85,22 dan tahun 2021 sebesar 85,63. Sedangkan IPM perempuan di Kota Semarang sebesar 81,38 tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 81,92.

Jika dilihat dalam bentuk grafik perbandingan IPM Kota Semarang dengan IPM nasional adalah sebagai berikut :

Grafik
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang
Tahun 2020-2021



Data di atas pun juga menunjukkan bahwa IPM Kota Semarang lebih tinggi angkanya daripada IPM Indonesia, dengan skor hasil sangat tinggi.

Pencapaian IPM baik laki-laki maupun perempuan di Kota Semarang dan Indonesia di tahun 2020 dan 2021 menunjukkan peningkatan walaupun tidak besar. Salah satu perlambatan pertumbuhan IPM karena adanya pandemic covid. IPM Indonesia untuk laki-laki tahun 2020 sebesar 75,98 dan mengalami pertumbuhan di tahun 2021 menjadi 76,25. IPM perempuan untuk tahun 2020 sebesar 69,19 dan mengalami pertumbuhan menjadi 69,59.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG memiliki komponen pembentukan yang menentukan nilai dari IPG. Komponen pembentukan tersebut sama dengan yang digunakan dalam pengukuran IPM yakni komponen dari dimensi kesehatan, pengetahuan dan ekonomi. Dari aspek kesehatan, kesenjangan gender

dapat dilihat dari persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Dari aspek pengetahuan, kesenjangan gender dapat terlihat dari Angka Buta Huruf (ABH) serta Angka Partisipasi Sekolah (APS) di tiga jenjang pendidikan yaitu SD, SMP dan SMA/ sederajat. Dari aspek ekonomi, kesenjangan gender dapat terlihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sedangkan rasio jenis kelamin dan rasio jenis kelamin saat melahirkan merupakan indikator yang dapat menjelaskan orientasi gender.⁷

Tabel
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Semarang
Tahun 2020-2021

Wilayah	2020	2021
Kota Semarang	95,49	95,67
Kendal	93,19	93,30
Demak	90,90	91,16
Kab. Semarang	96,38	96,61
Indonesia	91,06	91,27

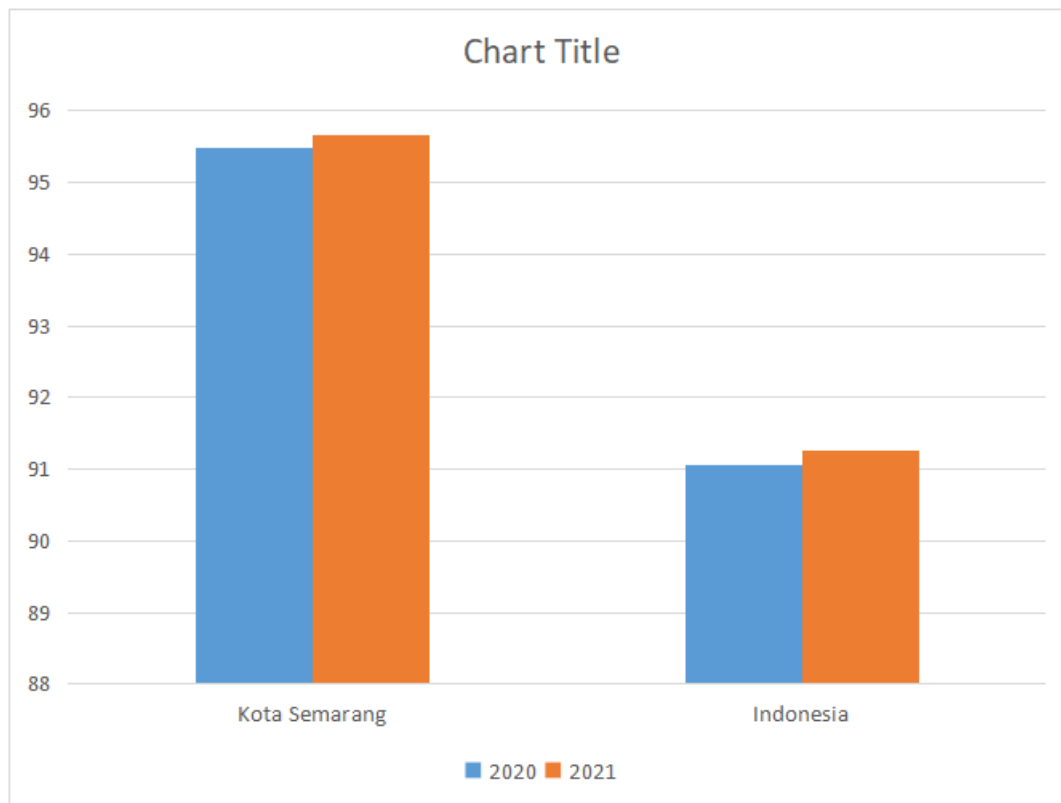
Sumber : BPS, 2021

Untuk IPG Kota Semarang tahun 2020 sebesar 95,49 dan naik di tahun 2021 yaitu sebesar 95,67, ini menunjukkan masih terjadi kesenjangan gender pada hasil pembangunan. Kesenjangan tersebut masih menunjukkan belum maksimalnya peran perempuan diberbagai sector kehidupan, sebagai tenaga kerja profesional dan belum optimalnya sumbangan pendapatan perempuan.

Realita di lapangan terlihat bahwa perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga keterwakilan dalam berpolitik. Hal ini mempengaruhi secara langsung pada tercapainya kesetaraan pembangunan bagi perempuan dan laki-laki.

⁷Pemodelan Indeks Pembangunan Gender dengan Pendekatan Pemodelan Regresi Nonparametrik Spline di Indonesia, Nurul Fajriyyah dan I Nyoman Budiantara, Jurnal Sains dan Seni ITS, Vol.4, No.2, 2015

Grafik
IDG Kota Semarang dan Indonesia



Data diatas menunjukkan bahwa IDG Kota Semarang diatas IDG Indonesia. Untuk tahun 2021 IDG Kota Semarang sebesar 95,67 sedangkan IDG Nasional sebesar 91,27.

3. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran perkapita menjadi salah satu yang menjadi tolak ukur pencapaian IDG. Pengeluaran per kapita menunjukkan besarnya pengeluaran setiap anggota rumah tangga dalam kurun waktu satu bulan (BPS, 2008). Maksud dari rumah tangga sendiri adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Dimana pengeluaran perkapita dipengaruhi oleh pendapatan perkapitanya. Asumsi ini menjelaskan pada saat pendapatan seseorang semakin meningkat maka semakin tinggi pula pengeluarannya.

Data dibawah berbicara mengenai pengeluaran perkapita dalam ranah gender.

Tabel
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin
(Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

Wilayah	Laki-Laki		Perempuan	
	2020	2021	2020	2021
Kota Semarang	16.128	16.436	14.287	14.442
Kendal	14.842	15.078	10.567	10.740
Demak	14.597	14.840	8.613	8.705
Kab. Semarang	12.882	12.976	11.733	11.843
Indonesia	15.463	15.770	9.004	9.050

Sumber : BPS 2021

Dalam tabel diatas secara garis besar terjadi perbedaan pengeluaran per kapita antara perempuan dengan laki-laki di Kota Semarang maupun di tingkat Nasional. Dapat dilihat di Kota Semarang untuk tahun 2021 pengeluaran per kapita perempuan selama 1 tahun sebesar a Rp. 14.442.000, sedangkan untuk laki-laki sebesar Rp. 16.436.000. artinya pengeluaran per kapita laki-laki lebih besar daripada perempuan. Hal ini bisa dimungkinkan karena karakteristik perempuan dalam mengelola keuangan lebih cermat, disiplin dan lebih detail dibandingkan dengan laki-laki (hasil survei nasional dalam mengelola keuangan)

4. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah jumlah tahun yang diharapkan untuk hidup berdasarkan rata-rata statistik. Penghitungan angka harapan hidup dengan menghitung rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Jika rata-rata anak lahir hidup diketahui maka akan diketahui pula angka rata-rata kematian anak, karena angka harapan hidup berhubungan erat dengan angka kematian bayi. Jika angka kematian bayi tinggi, maka angka harapan hidupnya akan rendah. Begitu sebaliknya, angka kematian bayi rendah maka angka harapan hidup tinggi. Adapun variabel penting yang mempengaruhi harapan hidup seseorang diantaranya : gaya hidup, akses ke fasilitas kesehatan dan status ekonomi.

Seperti pada data tahun 2021, Jika AHH pada data laki-laki menunjukkan angka 75,79 maka laki-laki di wilayah tersebut bisa bertahan hidup hingga usia 75-76 tahun. Hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Untuk AHH di Kota Semarang dan Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020-2021

Wilayah	Laki-Laki		Perempuan	
	2020	2021	2020	2021
Kota Semarang	75,59	75,79	79,26	79,43
Kendal	72,58	72,64	76,26	76,34
Demak	73,59	73,64	77,29	77,37
Kab. Semarang	73,93	74,00	77,61	77,69
Indonesia	69,59	69,67	73,46	73,55

Sumber : BPS 2021

Data menunjukkan bahwa AHH laki-laki lebih pendek daripada AHH perempuan baik di Kota Semarang maupun di Indonesia. Untuk di Kota Semarang, AHH laki-laki tahun 2020 sebesar 75,59 dan tahun 2021 sebesar 75,79. sedangkan AHH perempuan tahun 2020 sebesar 79,26 dan tahun 2021 sebesar 79,43. Terlihat juga dari tahun 2020 ke 2021 terjadi peningkatan AHH untuk laki-laki dan perempuan dan kecenderungan AHH perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini sesuai dengan pendapat WHO yang menyatakan bahwa di seluruh dunia rata-rata wanita memang mempunyai angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria.

5. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Yang dimaksud rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). untuk menghitung RLS dibutuhkan informasi terkait dengan : 1) partisipasi sekolah; 2) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; 3) ijazah tertinggi yang dimiliki; 4) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Kegunaan dari RLS adalah untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal, karena ada korelasi antara lama sekolah yang ditempuh penduduk dengan kualitas talenta sumber daya di wilayah tersebut.

Tabel
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020-2021

Wilayah	Laki-Laki		Perempuan	
	2020	2021	2020	2021
Kota Semarang	11,42	11,51	10,16	10,44
Kendal	8,10	8,11	6,84	6,89
Demak	8,28	8,31	7,22	7,42
Kab. Semarang	8,45	8,46	7,63	7,75
Indonesia	8,90	8,92	8,07	8,17

Sumber : BPS 2021

Data diatas menunjukkan secara garis besar RLS perempuan lebih rendah dibanding RLS laki-laki. Untuk tahun 2021 di Kota Semarang RLS perempuan adalah 10,44 atau setara dengan kelas 1 SMA, sedangkan RLS laki-laki adalah 11,51 atau setara dengan kelas 2 SMA. Hal ini menunjukkan masih ada kesenjangan dalam pemcapaian rata-rata lama sekolah antara perempuan dengan laki-laki.

Sedangkan secara umum angka RLS di Kota Semarang lebih tinggi dibandingkan di tingkat nasional dengan RLS nasional ada di 8,17 (tahun 2021) atau setara dengan kelas 2 SMP.

1. BIDANG KESEHATAN

a. Kesehatan Ibu dan Anak

Untuk mewujudkan Kota Semarang menjadi kota sehat, dibutuhkan ibu yang cerdas mengelola waktu, keuangan keluarga, kreatif dan selalu berpikir positif. Ibu cerdas dan kreatif akan memiliki anak yang sehat secara jasmani maupun rohani. Dari hal kecil inilah akan terbentuk generasi bangsa khususnya generasi Kota Semarang yang sehat dan berjiwa kuat. Oleh karena itu peran ibu penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Diperlukan juga kesadaran ibu tentang pentingnya ASI dan keselamatan persalinan sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

Untuk itu perlunya pemantauan data terkait dengan kesehatan ibu dan anak di Kota Semarang sebagai antisipasi kesehatan yang buruk pada ibu dan anak. Selama tahun 2021, gambaran kesehatan ibu dan anak di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel
Kesehatan Ibu dan Anak
Tahun 2021

Uraian	Jumlah	Satuan
Angka Kematian Ibu (AKI)	92.32	/100.000 KH
Jumlah Kasus Kematian Ibu : Hamil	0	org
Jumlah Kasus Kematian Ibu : Melahirkan	9	org
Jumlah Kasus Kematian Ibu : Nifas	12	org
Jumlah Kelahiran Hidup	22.030	org
Jumlah Persalinan Yang Di Tolong Nakes	22.040	org
Jumlah Persalinan Yang Di Tolong Non Nakes	0	org
Jumlah Penemuan Baru Kasus HIV-AIDS	270	org
Jumlah Usia Dewasa Dengan HIV-AIDS	206	org
Jumlah Ibu Rumah Tangga Dengan HIV-AIDS	39	org
Jumlah Usia Anak Dengan HIV-AIDS	4	org
Angka Kematian Bayi (AKB)	6.04	/1.000 KH
Jumlah Kasus Kematian Bayi	133	org
Angka Kematian Balita (AKABA)	6.95	/1.000 KH
Jumlah Kasus Kematian Balita	153	org
Persentase Balita BGM (Bawah Garis Merah)	0.12	%
Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk	37	org
Jumlah Kasus Balita Gizi Kurang	891	org
Jumlah Kasus Balita Gizi Lebih	859	org
Jumlah Kasus Balita Stunting	1.367	org
Persentase Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	100	%
Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	99.69	%
Persentase ASI Eksklusif	76.05	%
Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas Rujukan Korban Kekerasan	2	Unit

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2021

Dilihat dari data diatas bahwa angka kematian ibu (AKI) sebesar 92.32/100.000 KH, dimana kasus kematian ibu melahirkan sebanyak 9 orang dan kasus kematian ibu nifas sebanyak 12 orang, sedangkan untuk kasus kematian ibu hamil adalah nihil. Penyebab kematian ibu melahirkan dan nifas karena :

Tabel

Penyebab kematian ibu melahirkan dan nifas

No	Penyebab kematian ibu	Jumlah (jiwa)
1	Perdarahan	2
2	Pre eklamsi/eklamsi	3
	Lain-lain (Covid)	16

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2021

Data diatas menunjukkan adanya kasus kematian ibu akibat pendarahan. Yang dimaksud pendarahan adalah keluarnya atau hilangnya darah sebanyak 500 ml atau lebih setelah persalinan. Kematian karena pendarahan pasca persalinan biasanya terjadi dalam 24 jam setelah persalinan. Dan di Kota Semarang terdapat 2 kasus kematian akibat pendarahan.

Pre-eklamsi adalah kondisi peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urine. Kondisi ini terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Sedangkan eklamsi adalah komplikasi kehamilan yang ditandai tekanan darah tinggi dan kejang sebelum, selama dan setelah persalinan. Kondisi serius ini selalu didahului dengan pre-eklamsi sebelumnya. Di Kota Semarang ada 3 kasus kematian ibu karena pre-eklamsi / eklamsi.

Untuk menekan angka kematian ibu hamil dan melahirkan, Kota Semarang berusaha meningkatkan pelayanan pada masyarakat, seperti : di tahun 2021 Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Pabrik Pantja Tunggal dan PT SAMA melaksanakan program “GEPUK PEPES” (Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Kota Semarang). Tujuannya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu, dengan kegiatan yang dilakukan yaitu:

- Kelas Ibu Hamil
- Pelayanan KIA (KB, ANC Terpadu)

Kota Semarang juga telah berhasil mendampingi ibu hamil dimana ibu hamil diarahkan untuk melakukan persalinan dengan dibantu petugas nakes, dengan jumlah 22.040 persalinan ditolong nakes. Dorongan untuk program persalinan ditolong nakes ini bertujuan untuk menekan angka kematian ibu bersalin karena petugas nakes Kota Semarang telah mendapat bekal ketrampilan yang baik dan didukung peralatan dan sistem pelayanan yang terstandarisasi.

Terkait dengan kasus HIV-AIDS dengan kasus baru sebanyak 270 orang, usia dewasa sebanyak 206 orang. Juga terdapat kasus yang dialami ibu dengan HIV-AIDS sebanyak 39 orang dan anak ada 4 orang.

Untuk jumlah kematian bayi ada 133 orang dan kematian balita ada 153 orang. Adapun penyebab meninggalnya bayi dan balita di Kota Semarang adalah :

Tabel
Penyebab Kematian Bayi dan Balita di Kota Semarang

No	Penyebab	Jumlah (jiwa)	Keterangan
Bayi			
1	BBLR	11	
2	Asfiksia	41	
3	Sepsis	7	
4	Kelainan Kongenital	23	
5	Lain-lain	23	(Hipotermi 2, Gagal Napas 2, KPD 2, Hiperglikemi 1, dehidrasi 4, Batang Otak tidak berfungsi 1, tali pusat terpilin 2, Ileus 1, Demam 3, Aspirasi ASI 1, SIDS 1, Diare 1, DBD 1, perdarahan 1)
6	Pneumonia	2	
7	Diare	3	
8	Lain-lain	21	(Tersedak 1, Dehidrasi 2, Cardiorespiratory 3, Hipertermi 1, Kelainan Kongenital 14)
Balita			
1	Diare	3	
2	DBD	1	
3	Lain-lain	16	(Gangguan Liver 1, Cardiac Arrest 3, Tumor 1, Cardiorespiratory failed 2, Syokhipovolemik 2, Infeksi 4, Kelainan kongenital 2, Respiratory failur 1)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2021

Penyebab terbanyak bayi meninggal adalah kasus asfiksia yaitu sebanyak 41 orang. Asfiksia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan kadar oksigen akibat gangguan pada fungsi pernafasan termasuk paru-paru. Bayi yang mengalami asfiksia ditandai dengan tidak menangis dan terjadi perubahan warna kulit menjadi kebiruan serta sulit bernafas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan masalah serius seperti kerusakan pada jaringan dan organ tubuh bayi.

Kelainan kongenital menempati posisi kedua terbanyak bayi meninggal yaitu sebanyak 23 orang. Kelainan kongenital atau kelainan bawaan adalah kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Kelainan ini dapat mempengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh bayi sehingga menimbulkan cacat lahir.

Sedangkan jumlah kematian Balita ada 153 orang dengan penyebabnya adalah : diare ada 3 orang; DBD ada 1 orang dan penyakit lainnya ada 16 orang.

Faktor yang berkontribusi pada kematian bayi dan balita yang terjadi di Kota Semarang yaitu tingkat pendidikan ibu dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu perlu pencegahan terhadap kasus kematian bayi seperti pemeriksaan rutin pada ibu hamil, dukungan fasilitas kesehatan pemerintah daerah, menyediakan sanitasi, akses air minum bersih, imunisasi melawan penyakit infeksi, dan langkah-langkah kesehatan publik lainnya.

Anak dengan gizi buruk, gizi kurang dan stunting masih ada di Kota Semarang dan jumlahnya pun cukup banyak. Untuk gizi buruk ada 37 orang, gizi kurang ada 891 orang, gizi lebih ada 859 orang dan stunting ada 1.367 orang. Dan seluruh kasus tersebut telah mendapatkan perawatan dari pemerintah kota mencapai 100%. program yang dijalankan Pemerintah Kota Semarang untuk menekan angka gizi buruk, gizi kurang dan stunting berupa : program SAN PIISAN (Sayangi Dampingi Ibu dan Anak Kota Semarang) yang merupakan upaya promotif, preventif dan kuratif yang mengedepankan konsep bergerak bersama untuk menurunkan stunting, AKI dan AKB. Program ini diperuntukkan bagi remaja, calon pengantin, masa 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) yang meliputi ibu hamil, ibu nifas, bayi) dan balita serta anak sekolah dari sekolah dasar sampai tingkat SLTA.

Untuk cakupan imunisasi dasar lengkap sudah 99.69%, artinya bayi dan balita di Kota Semarang hampir seluruhnya sudah menerima imunisasi dasar lengkap. Sedangkan persentase ASI eksklusif mencapai 75.05% lebih tinggi capaian dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 71,31%. beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi capaian ASI eksklusif yaitu :

1. Ibu nifas dengan covid sebagian tidak menyusui
2. Ibu dengan resiko dengan HIV Aids sebagian tidak menyusui
3. Sebagian ibu bekerja yang merasa tidak bisa menyusui secara eksklusif
4. Ibu bayi meninggal sebelum bayi berumur 6 bulan
5. Bayi resti karena alasan medis tdk bisa menyusui

Adapun peningkatan capaian karena salah satu efek dari makin banyaknya pojok ASI yang telah dibuat di beberapa kerja, puskesmas dan tempat umum.

b. Kesehatan dimasa Pandemi

Tabel
Anak yang Terpapar Covid-19
Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah Anak Usia 0-18 th
1	Terkonfirmasi	3916 anak
2	Meninggal	27 anak
3	Sembuh	3889 anak

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang 2021

Selama pandemic terkonfirmasi 3.916 anak dengan kasus meninggal 27 anak dan sembuh ada 3889 anak. Dinas Kesehatan Kota Semarang berusaha menekan korban covid dengan cara:

- Edukasi Covid-19 di tingkat keluarga, RT maupun RW
- Imunisasi Covid-19 untuk anak usia mulai dari 6 tahun
- Pelayanan bayi baru lahir
- Screening Covid-19 pada anak yang orang tuanya positif Covid-19
- Pendampingan pasien terkonfirmasi
- Tracing dan pendampingan Kontak Erat
- Pemeriksaan Swab Antigen / PCR untuk pasien terkonfirmasi maupun kontak erat

c. Kesehatan dan Kesejahteraan Anak

Pelayanan kespro remaja, penanganan NAPZA, HIV/AIDSs, kesehatan jiwa, disabilitas dan peningkatan kesejahteraan anak dari keluarga miskin :

1. Kespro Remaja

Pelayanan kesehatan reproduksi melalui pelayanan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) melalui pendidikan formal (sekolah) yang masuk dalam kurikulum sekolah serta melalui jalur non formal (luar sekolah) dimana pelayanannya meliputi penyuluhan maupun konseling

2. Penanganan NAPZA

- a. Memiliki Tenaga Kesehatan Terlatih (termasuk OJT dan Workshop) Deteksi Dini NAPZA dg ASSIST
- b. Melakukan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza dengan instrument ASSIST pada anak sekolah SMP dan SMA sederajat
- c. Melakukan rujukan kasus Napza ke IPWL sesuai kebutuhan Faskes IPWL (Pusk Poncol), Non IPWL (Pusk. Halmahera, Gunungpati)
- d. Pembentukan 3 Kelurahan Bersinar (Bersih Tanpa Narkoba) di Kelurahan Krobokan, Sekayu, Wonosari oleh KesBangPol dan BNN bekerjasama dengan DKK dan Puskesmas Wilayah tahun 2021

3. HIV/AIDS

- a. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada anak sekolah dasar, HIV dan AIDS pada anak SMP dan SMA
- b. Pertemuan kelompok dukungan sebaya anak dengan HIV (motivasi patuh minum obat, pemberian PMT)
- c. Evaluasi keadaan klinis anak dengan HIV oleh fasyankes
- d. pemberian ARV untuk anak dengan HIV oleh dokter spesialis Anak.
- e. Anak dengan HIV yang terlantar di ampu rumah singgah "rumah Aira Semarang"

4. Kesehatan Jiwa

- a. Melakukan koordinasi dan advokasi dengan Dinas Sosial dan RSJ Amino dengan membuat WAG utk memudahkan koordinasi
- b. Deteksi dini Kesehatan Jiwa dengan Form SRQ di masyarakat
- c. Melakukan pendampingan ODGJ pasca perawatan di RSJ dengan Aplikasi si-Kopen harapannya dilakukan pemantuan oleh Puskesmas Wilayah
- d. Bekerja sama dengan Tim Penjangkau Dinsos, RSJ dan Puskesmas terkait penanganan ODGJ Berat yang ditemukan di Lapangan

5. Disabilitas

- a. Posbindu disabilitas

6. Program peningkatan kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin

- a. Untuk pelayanan kesehatan pada keluarga miskin, disarankan mendaftar UHC (Universal Health coverage) yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Kota Semarang

d. Kawasan Tanpa Rokok

Sesuai dengan Perwal Kota Semarang No. 12 tahun 2009 tentang KTR dan KTM Kota Semarang ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok, meliputi

1. Sarana Kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Arena kegiatan anak
4. Tempat ibadah
5. Angkutan umum

e. Akses Air Minum

Upaya untuk menyediakan sarana air bersih dan sanitasi terus ditingkatkan karena membawa efek positif bagi kesehatan keluarga. Salah satunya adalah mengurangi terjadinya diare atau cacingan karena air minum tidak layak dan sanitasi buruk.

Tabel

Akses Air Minum Layak dan Bersih Tahun 2021

No	Uraian	Prosentase
1	Akses air minum layak	98.90%
2	Akses air minum bersih	95.09%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2021

Jumlah penduduk yang besar berpotensi memunculkan permasalahan, seperti laju pertumbuhan ekonomi terhambat, angka pengangguran meningkat hingga kriminalitas. Untuk itu, pemerintah berusaha menekan angka pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana. Keluarga Berencana (KB) adalah gerakan membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.

Data terkait dengan kepesertaan KB selalu diperbaharui untuk melihat seberapa besar pengaruh program pemerintah terhadap kepesertaan KB dan untuk memantau pertumbuhan angka kelahiran. Terkait dengan kepesertaan warga Kota Semarang dalam mengatur jumlah anak dengan melakukan KB dapat terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel
Jumlah Peserta KB di Kota Semarang

URAIAN INDIKATOR	JUMLAH	SATUAN
Jumlah Pasangan Usia Subur	236,795	Psg
Jumlah Peserta KB Aktif IUD	486	org
Jumlah Peserta KB Aktif MOW	87	org
Jumlah Peserta KB Aktif MOP	24	org
Jumlah Peserta KB Aktif Implant	674	org
Jumlah Peserta KB Baru IUD	300	org
Jumlah Peserta KB Baru MOW	79	org
Jumlah Peserta KB Baru MOP	22	org
Jumlah Peserta KB Baru PIL	318	org
Angka Drop Out (DO) Peserta KB Aktif	-1,93	%
Angka Unmet Need	11,49	%
Persentase PB MKJP Terhadap PB Total	39,65	%

Sumber : Disdalduk KB Kota Semarang, 2021

Alat KB yang diminati ibu-ibu yaitu KB aktif implant / KB susuk yaitu alat kontrasepsi jangka panjang yang digunakan oleh wanita, berbentuk menyerupai tabung plastik kecil dan fleksibel, berisi hormon untuk mencegah kehamilan dan dimasukkan ke dalam kulit lengan atas. Jumlah peminat KB implant ini ada 674 orang.

Sedangkan angka unmet need menunjukkan angka 11,49%, artinya besaran angka tersebut menunjukkan proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan-anak atau mereka yang tidak menginginkan pemasangan alat kontrasepsi karena resiko kesehatan dan pemakaian kontrasepsi yang buruk.

Untuk saat ini belum ada data terkait kepesertaan KB laki-laki aktif, hal ini mungkin dianggap kurang lazim, sehingga yang diprioritaskan untuk melakukan KB aktif adalah pihak perempuan. Perlunya dukungan dari pemerintah daerah untuk mensosialisasikan adanya KB untuk laki-laki agar tujuan pemerintah dalam menekan pertumbuhan pendudukan lebih cepat terlaksana.

2. BIDANG PENDIDIKAN

Angka Buta Huruf (ABH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ABH terbanyak adalah kaum perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan pada data dibawah, untuk Indonesia terjadi perbedaan ABH dimana ABH laki-laki lebih rendah daripada ABH perempuan. ABH laki-laki tahun 2020 sebesar 2,32% dan tahun 2021 sebesar 2,38%, sedangkan ABH perempuan tahun 2019 sebesar 4,92% dan tahun 2021 sebesar 4,87%

Adapun ABH diKota Semarang menurut BPS untuk tahun 2021 sudah tidak ditemukan, walaupun ada jumlahnya sangat sedikit. Artinya penduduk Kota Semarang ada kemungkinan sudah bebas buta huruf untuk usia 10 tahun keatas. Ini menunjukkan keberhasilan program yang digalakkan dengan melakukan pengembangan gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat, dan gerakan literasi keluarga melalui pendidikan formal dan nonformal, seperti penuntasan masyarakat buta aksara, kesetaraan pendidikan dengan program Paket A, Paket B dan Paket C. Sedangkan untuk Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari buta huruf, karena tahun 2020 ada 2,32 ABH dan tahun 2021 ada 2,38 ABH.

Tabel

Penduduk Kota Semarang Berumur 10th ke Atas yang Buta Huruf

Wilayah	Laki-Laki		Perempuan	
	2020 (dalam %)	2021 (dalam %)	2020 (dalam %)	2021(dalam %)
Kota Semarang	0	0	0	0
Indonesia	2,32	2,38	4,92	4,87

Sumber : BPS 2021

Dalam dunia pendidikan, peran guru sangat penting untuk kemajuan pendidikan, karena kualitas guru sangat mempengaruhi kualitas anak didiknya. Guru hendaknya memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar dan melatih. Keempat kemampuan tersebut

merupakan kemampuan integrativ, yang satu sama lain tak terpisahkan. Oleh karena itu keberadaan guru sangat penting bagi pendidikan di sekolah.

Berikut jumlah guru yang mengajar di Kota Semarang.

Tabel
Jumlah Guru di Kota Semarang
Tahun Ajaran 2021/2022

No	Wilayah	Total		
		Jml	L	P
1	Kec. Semarang Barat	1,703	526	1,177
2	Kec. Pedurungan	1,681	419	1,262
3	Kec. Banyumanik	1,610	497	1,113
4	Kec. Semarang Selatan	1,474	543	931
5	Kec. Semarang Tengah	1,455	525	930
6	Kec. Tembalang	1,333	369	964
7	Kec. Semarang Timur	1,128	402	726
8	Kec. Ngaliyan	985	301	684
9	Kec. Mijen	970	312	658
10	Kec. Gunung Pati	909	270	639
11	Kec. Genuk	878	272	606
12	Kec. Candisari	803	241	562
13	Kec. Semarang Utara	784	268	516
14	Kec. Gajah Mungkur	764	212	552
15	Kec. Gayamsari	709	220	489
16	Kec. Tugu	379	143	236
Total	Total	17,565	5,520	12,045

Sumber : dapok.kemendikbud, 2021

Merujuk pada tabel diatas yang menunjukkan bahwa jumlah guru yang terbanyak dilakukan oleh perempuan dengan jumlah 12,045 orang dibandingkan dengan guru laki-laki yang jumlahnya 5,520. Menurut penelitian, kondisi ini disebabkan karena :

1. Wanita dipandang sebagai sosok yang tepat menjadi guru karena nalurnya sebagai seorang ibu, yang telaten mengasuh anak.
2. Menyangkut kesejahteraan. Laki-laki disarankan untuk mencari penghasilan yang lebih tinggi karena harus menopang ekonomi keluarga yang utama, karena masyarakat masih beranggapan kalau gaji guru masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Masyarakat masih memandang bahwa profesi guru untuk laki-laki kurang bergengsi dan merupakan pilihan ke sekian karena tidak ada profesi lain yang dilakukan.

Selain guru, yang berperan dalam dunia pendidikan adalah keberadaan anak didik, karena tanpa adanya peserta didik tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Anak didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Berikut terdapat data mengenai jumlah anak didik di Kota Semarang.

Tabel
Data Anak Didik di Kota Semarang
Tahun Ajaran 2021/2022

No	Wilayah	Total		
		Jml	L	P
1	Kec. Pedurungan	28,889	14,473	14,416
2	Kec. Banyumanik	27,305	14,085	13,22
3	Kec. Semarang Selatan	27,007	13,903	13,104
4	Kec. Semarang Barat	26,739	13,691	13,048
5	Kec. Semarang Tengah	22,752	11,726	11,026
6	Kec. Tembalang	22,705	11,847	10,858
7	Kec. Semarang Timur	20,711	10,269	10,442
8	Kec. Mijen	18,449	9,583	8,866
9	Kec. Ngaliyan	17,416	8,694	8,722
10	Kec. Genuk	17,392	8,858	8,534
11	Kec. Gunung Pati	14,634	7,489	7,145
12	Kec. Semarang Utara	14,446	7,826	6,62
13	Kec. Candisari	12,816	6,858	5,958
14	Kec. Gayamsari	12,799	6,761	6,038
15	Kec. Gajah Mungkur	12,555	6,548	6,007
16	Kec. Tugu	7,128	3,897	3,231
Total	Total	303,743	156,508	147,235

Sumber : dapodik.kemendikbud, 2021

3. BIDANG EKONOMI DAN TENAGA KERJA

PEREMPUAN DAN ANGKATAN KERJA

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja di Kota Semarang mengalami kenaikan sebanyak 25.621 orang dari 1.465 ribu orang pada Agustus 2020 menjadi 1.490 orang pada Agustus 2021. Trend ini dikatakan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Semarang.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, menunjukkan bahwa laki-laki lebih tinggi persentasenya dibandingkan perempuan yaitu 10,01% dan 8.94% pada Agustus 2021. Artinya laki-laki lebih banyak yang menganggur / bekerja serabutan dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu daripada perempuan. Bisa dikatakan perempuan memiliki alasan karena status pekerjaannya adalah ibu rumah tangga.

Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, untuk Kota Semarang TPAK masih didominasi laki-laki dengan partisipasi sebesar 79,99% dan TPAK perempuan hanya sebesar 59,42%. TPAK laki-laki naik 0,13% sedangkan TPAK perempuan turun sebesar 1,06%

Tabel
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Agustus 2020-2021

No	Status Ketenagakerjaan	Agustus 2020 (jiwa)	Agustus 2021 (jiwa)	Perubahan (%)
1	Penduduk usia kerja	1.465.121	1.490.742	1,75
		Persen	persen	Poin persen
2	Tingkat pengangguran terbuka	9,57	9,54	-0,03
	Laki-laki	10,08	10,01	-0,07
	Perempuan	8,94	8,94	0,00
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,89	69,41	-0,47
	Laki-Laki	79,86	79,99	0,13
	Perempuan	60,48	59,42	-1,06

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2021

Tabel
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

No	Cakupan	Persentase	
	Jenis Pekerjaan		
1	Pekerja keluarga / tidak dibayar	6,95	
2	Pekerja bebas non pertanian	5,56	
3	Pekerja bebas di pertanian	0,35	
4	Buruh/karyawan/pegawai	61,14	
5	Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar	3,09	
6	Berusaha dibantu pekerja tidak tetap	5,44	
7	Berusaha sendiri	17,47	
	Kegiatan Formal/Informal	Jumlah (Jiwa)	%
1	Formal	601.209	64,23
2	Informal	334.867	35,77

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2021

Dari data mengenai status pekerjaan utama menunjukkan bahwa penduduk yang berstatus buruh/karyawan/pegawai memiliki persentase tertinggi yaitu 61,14%; berusaha sendiri sebesar 17,47% dan pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 6,95%. Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dengan buruh tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2021 penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 601.209 orang (64,23%) sedangkan pekerja di kegiatan informal sebanyak 334.867 orang (35,77%)

Pengangguran menurut Jenis Kelamin

Selama 2 tahun terakhir, tingkat pengangguran perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pada Agustus 2021, pengangguran laki-laki mencapai 10.01%, sementara perempuan mencapai 8.94%. Sedangkan pengangguran yang dialami oleh laki-laki mencapai 10.08% dan perempuan 8.94%.

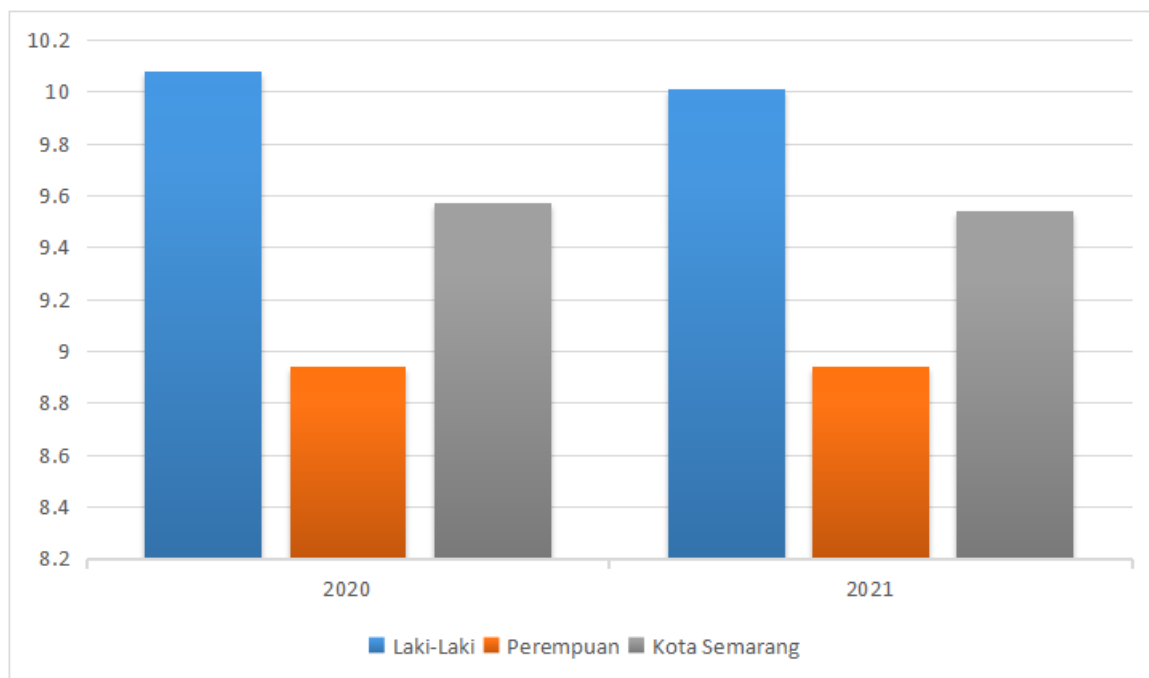
Tabel
Pengangguran menurut Jenis Kelamin
Per Agustus 2021

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Kota Semarang
2020	10.08	8.94	9.57
2021	10.01	8.94	9.54

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2021

Grafik

**Pengangguran menurut Jenis Kelamin
Per Agustus 2021**



Sedangkan untuk mata pencaharian kepala keluarga di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel
Mata Pencaharian Kepala Keluarga di Kota Semarang
Tahun 2021

No	Mata Pencaharian	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	8.963	7.810	16.773	3,01
2	Mengurus rumah tangga	0	48.909	48.909	8,77
3	Pelajar / mahasiswa	3.817	2.347	6.164	1,11
4	Pensiun	9.504	2.585	12.089	2,17
5	PNS	20.000	2.860	22.860	4,1
6	TNI	4.516	27	4.543	0.81
7	Kepolisiam RI	4.818	80	4.898	0.88
8	Perdagangan	641	115	756	0,14
9	Petani/pekebun	4.253	1.410	5.663	1,02
10	Peternak	8	0	8	0,00
11	Nelayan/perikanan	1.089	86	1.175	0,21
12	Industri	105	5	110	0,02
13	Konstruksi	130	4	134	0,02
14	Transportasi	105	3	108	0,02
15	Karyawan swasta	281.103	28.772	309.875	55,56
16	Karyawan BUMN	3.902	165	4.067	0,73
17	Karyawan BUMD	432	27	459	0,08

18	Karyawan honorer	724	47	771	0,14
19	Buruh harian lepas	9.500	1.712	11.212	2,01
20	Buruh tani/perkebunan	17.053	4.379	21.432	3,84
21	Buruh nelayan/perikanan	49	2	51	0,01
22	Buruh ternak	11	1	112	0,00
23	Pembantu rumah tangga	9	240	249	0,04
24	Tukang cukur	27	0	27	0,00
25	Tukang listrik	33	0	33	0,01
26	Tukang batu	346	0	346	0,06
27	Tukang kayu	94	0	94	0,00
28	Tukang sol sepatu	9	0	9	0,00
29	Tukang las/pandai besi	73	0	73	0,01
30	Tukang jahit	93	37	130	0,02
31	Tukang gigi	0	0	0	0,00
32	Penata rias	0	9	9	0,00
33	Penata busana	5	2	7	0,00
34	Penata rambut	4	8	12	0,00
35	Mekanik	266	1	267	0,05
36	Seniman	83	3	86	0,02
37	Tabib	7	0	7	0,00
38	Paraji	0	0	0	0
39	Perancang busana	1	1	2	0,00
40	Penterjemah	4	0	4	0,00
41	Imam masjid	3	0	3	0,00
42	Pendeta	279	24	303	0,05
43	Pastor	23	0	23	0,00
44	Wartawan	148	3	151	0,03
45	Ustadz/mubalig	27	0	27	
46	Juru masak	32	5	37	0,01
47	Promotor acara	3	0	3	0,00
48	Anggota DPR-RI	2	0	2	0,00
49	Anggota DPD	1	0	1	0,00
50	Gubernur	1	0	1	0,00
51	Wakil gubernur	1	0	1	0,00
52	Walikota	2	0	2	0,00
53	Anggota DPRD Provinsi	6	2	8	0,00
54	Anggota DPRD Kabupaten	6	2	8	0,00
55	Dosen	2.077	270	2.347	0,42
56	Guru	4320	1.716	6.036	1,08
57	Pilot	17	0	17	
58	Pengacara	142	7	149	0,03
59	Notaris	40	26	66	0,01
60	Arsitek	76	1	77	0,01
61	Akuntan	11	2	13	0,00
62	Konsultan	113	4	117	0,02
63	Dokter	1.107	227	1.334	0,24
64	Bidan	0	58	58	0,01

65	Perawat	396	268	664	0,12
66	Apoteker	51	20	71	0,01
67	Psikiater/psikolog	2	3	5	0,00
68	Penyiar televise	0	1	1	0,00
69	Penyiar radio	3	1	4	0,00
70	Pelaut	455	0	455	0,08
71	Peneliti	6	1	7	0,00
72	Sopir	838	0	838	0,15
73	Pialang	3	1	4	0,00
74	Paranormal	3	0	3	0,00
75	Pedagang	3.375	2.586	5.961	1,07
76	Perangkat desa	3	0	3	0,00
77	Kepala desa	1	0	1	0,00
78	Biarawati	0	95	95	0,02
79	Wiraswasta	47.512	8.385	55.897	10,02
80	Lainnya	6.239	3.285	9.524	1,17
	Total			557.743	100

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2021

Data diatas menunjukkan mata pencaharian kepala keluarga di Kota Semarang yng berjumlah 557.743 KK. Adapun mata pencaharian yang terbanyak adalah sebagai wiraswasta. Terjadi kesenjangan gender yang mana lebih bayak laki-laki yang menjadi wiraswasta dibandingkan perempuan, dengan jumlah 47.512 laki-laki dan 8.385 perempuan. Mata pencaharian terbanyak ke dua yaitu sebagai karyawan swasta dimana dalam status ini pekerja laki-laki masih mendominasi status pekerja swasta, dengan jumlah 281.103 laki-laki dan 28.772 perempuan. Sedangkan diurutan ketiga ada pekerjaan sebagai pengurus rumah tangga yang dilakukan hanya oleh perempuan dengan jumlah 48.909 perempuan. Dari data diatas juga tampak bahwa banyak bidang pekerjaan didominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya memiliki akses kerja yang sedikit dan pada bidang yang kurang mendapatkan upah baik, seperti mengurus rumah tangga dan pembantu rumah tangga.

Perempuan dan Koperasi

Melalui data Dinas Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa di Kota Semarang terdapat tenaga kerja laki-laki sebanyak 1.680 orang dan tenaga kerja perempuan sebanyak 330 orang di sektor UMKM yang berjumlah 11.901 UMKM.⁸

Tabel
Perempuan dan Koperasi

Uraian Indikator	L	P	Jml	Satuan
Jumlah Koperasi Aktif			639	Unit
Jumlah Anggota Koperasi Aktif	81.271	78.681	159.952	Org
Jumlah Manager Koperasi	25	32	57	Org
Jumlah Karyawan Koperasi	1.518	948	2.467	Org
Jumlah Koperasi Wanita/Perempuan			40	Org
Jumlah Anggota Koperasi Wanita/Perempuan	16	5.855	5.871	Org
Jumlah Usaha Mikro			21.065	Unit
Jumlah Usaha Kecil			1.147	Unit
Jumlah Usaha Menengah			30	Unit
Jumlah Pelaku Usaha Mikro	8.097	12.968	21.065	Org
Jumlah Pelaku Usaha Kecil	692	455	1.147	Org
Jumlah Pelaku Usaha Menengah	15	15	30	Org
Jumlah UMKM Binaan			22.242	Unit
Jumlah Pelaku (Pemilik) UMKM Binaan	8.804	13.438	22.242	Org
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Binaan	17.281	19.251	36.532	Org

Sumber : Dinas Koperasi Kota Semarang, 2021

Data diatas menunjukkan ada 639 koperasi aktif sedangkan jumlah koperasi wanita ada 40 koperasi. Upaya dinas koperasi dalam melakukan modernisasi pada koperasi perempuan menjadi penggerak bagi pemberdayaan ekonomi perempuan, makin meningkatkan peran perempuan di dunia koperasi. Hal ini ditunjukkan dari data, walaupun jumlah anggota koperasi dan karyawan koperasi lebih banyak laki-laki daripada perempuan, tetapi yang menjadi manager koperasi lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Dari indikator diatas menunjukkan jumlah perempuan yang menjadi pemimpin / manager koperasi aktif ada 32 orang sedangkan yang laki-laki ada 25 orang. Untuk anggota koperasi aktif ada 81.271 orang laki-laki dan

⁸<https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota>

78.681 orang perempuan. Sedangkan untuk karyawan koperasi ada 1.518 orang laki-laki dan 948 orang perempuan.

Jumlah anggota koperasi wanita ada 5.855 orang perempuan sedangkan untuk laki-laki yang bekerja di koperasi perempuan ada 16 orang laki-laki. Sedangkan pelaku usaha mikro menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 12.968 orang perempuan dan 8.097 orang laki-laki.

Pelaku UMKM Binaan banyak dirasakan oleh perempuan dengan melihat hasil data dalam angka diatas, ada 13.438 perempuan dan 8.804 laki-laki. Sedangkan penyerapan tenaga kerja UMKM Binaan ada 19.251 perempuan dan 17.281 laki-laki.

Dinas Koperasi Kota Semarang membuka Gerai Kopimi, yaitu Gerakan MAsyarakat Koperasi dan UMKM Semarang Indonesia adalah wadah komunitas pelaku UMKM di Kota Semarang yang dilantik oleh Walikota Semarang pada tanggal 16 Desember 2019. Tujuan adanya Gerai Kopimi adalah wadah pertemuan koperasi dan usaha mikro untuk pengembangan usahanya sehingga koperasi menjadi sehat dan usaha mikro dapat naik kelas.

Ada 177 gerai di tingkat kelurahan, 16 di tingkat kecamatan, dan 7 di tingkat kota. Jika ditingkat kelurahan dan kecamatan disebut forum sedangkan di tingkat kota disebut himpunan. Sebagian besar pengurus Gerai Kopimi adalah perempuan karena perempuan cenderung lebih telaten, sabar dan teliti dalam melakukan kegiatan usaha.

4. BIDANG POLITIK DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Di bidang politik, terdapat Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 yang mengatur mengenai ketentuan keikutsertaan perempuan menduduki kursi legislatif sebesar 30% dari total jumlah anggota dalam parlemen. Akan tetapi, sejak disahkan kebijakan itu, angka perempuan belum mampu memenuhi kuota tersebut, dalam artian politik dan pemerintah masih didominasi oleh laki-laki.

Berikut tersaji data jumlah anggota DPRD Kota Semarang.

Tabel
Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang

Jumlah Anggota DPRD	L	P	Jumlah
Jumlah Anggota DPRD	38	9	47
Jumlah Pimpinan DPRD	4	0	4

Sumber : Sekretaris DPRD Kota Semarang, 2021

Data diatas yang menunjukkan jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD ada 9 orang dari 47 anggota DPRD Kota Semarang, dalam artian keterwakilan perempuan dalam mengambil kebijakan di pemerintahan belum mencapai 30% atau sekitar 20% dari total jumlah anggota DPRD saat ini.

Keterlibatan perempuan di ranah politik dirasa penting karena peran perempuan saat ini yang semula hanya berada pada ranah domestik kemudian mendapat kesempatan untuk menempati ruang publik menunjukkan harapan akan kesetaraan gender. Tetapi hal ini membutuhkan proses yang tidak singkat. Kesempatan menduduki kursi DPRD Kota Semarang masih belum sesuai harapan, padahal makin banyak perempuan yang berkecimpung menjadi anggota DPRD maka besar kesempatan dalam membuat kebijakan daerah yang memenuhi kepentingan perempuan.

Beberapa hal yang menghambat pencapaian 30% kuota perempuan pada ranah politik seperti : pertama, pengaruh budaya patriarki yang masih mengakar sehingga mambatasi partisipasi perempuan di bidang kepemimpinan dan pengambil keputusan. Kedua, peran dan organisasi partai politik dalam kepengurusan yang masih dominan laki-laki di setiap partai politik. Ketiga, banyak perempuan yang kurang berminat berkecimpung di dunia politik.

Tabel
Jumlah ASN di Kota Semarang

Pegawai	L	P	Jml	Satuan
Jumlah PNS	3,749	5,528	9,277	org
Jumlah Pejabat Eselon II	28	5	33	org
Jumlah Pejabat Eselon III	143	75	218	org
Jumlah Pejabat Eselon IV	793	666	1,459	org
Jumlah Pegawai Golongan I	50	7	57	org
Jumlah Pegawai Golongan II	886	500	1,386	org
Jumlah Pegawai Golongan III	2,064	3,480	5,544	org
Jumlah Pegawai Golongan IV	722	1,450	2,172	org
Jumlah Pejabat Es. II Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) PPPA	1	0	1	org
Jumlah Pejabat Es. III Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) PPPA	3	2	5	org
Jumlah Pejabat Es. IV Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) PPPA	5	10	15	org
Jumlah Pejabat Eselon I	0	0	0	org
Jumlah Bupati/Walikota	1	0	1	org
Jumlah Wakil Bupati/Walikota	0	1	1	org
Jumlah Camat	15	1	16	org
Jumlah Kepala Desa dan Lurah	102	58	160	org
Jumlah Anggota BPD	-	-	0	org
Jumlah Perangkat Desa	-	-	0	org

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang, 2021

Dari 9.277 orang ASN, terdapat 3.749 laki-laki dan 5.528 perempuan. Hal ini menunjukkan adanya dominasi perempuan dari laki-laki di ranah ASN Kota Semarang. Berbanding terbalik dengan komposisi pejabat di eselon II, III dan IV, dimana dominasi jumlah ada di bagian laki-laki, artinya ketimpangan gender masih terjadi di ranah pejabat eselon II, III dan IV.

Dilihat dari komposisi pegawai golongan I dan II masih didominasi oleh Laki-laki dengan jumlah pegawai golongan I 50 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Untuk golongan II ada 886 orang laki-laki dan 500 orang perempuan.

Sedangkan pada golongan III dan IV didominasi oleh perempuan dengan jumlah 3.480 orang perempuan dan 2.064 orang laki-laki pada golongan III. Sedangkan golongan IV ada 1.450 orang perempuan dan 722 orang laki-laki.

Jumlah pejabat eselon II dan III pada OPD, camat dan lurah masih didominasi laki-laki sedangkan pejabat eselon IV didominasi perempuan.

5. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Adapun jumlah PMKS di Kota Semarang menunjukkan jumlah 213.749 orang laki-laki dan 194.337 orang perempuan yang artinya yang berstatus PMKS lebih banyak laki-laki daripada perempuan.

Tabel

Indikator Bidang Sosial Kota Semarang

Uraian Indikator	L	P	Jml	Satuan
Jumlah Fakir Miskin	209.892	190.056	399.948	org
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	213749	194.337	408.086	org
Jumlah Lansia Terlantar	23	9	33	org
Jumlah Pengemis	2	3	3	org
Jumlah Gelandangan	1	0	1	org
Jumlah Keluarga Rawan Sosial Ekonomi				org
Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)				org
Jumlah Eks PSK Terdata	0	550	550	org
Jumlah Orang Dengan HIV-AIDS				org
Jumlah Eks Korban NAPZA				org
Jumlah Penyandang Disabilitas	2921	2790	5711	org
Jumlah Penyandang Tuna Daksa	125	126	251	org
Jumlah Penyandang Tuna Netra	145	125	270	org
Jumlah Penyandang Tuna Rungu / Wicara	145	125	270	org
Jumlah Penyandang Disabilitas Mental Retardasi (Tuna Grahita)	76	61	137	org
Jumlah Penyandang Disabilitas Mental Eks Psikotik (Tuna Laras / Gila)	38	20	60	org
Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	53	38	91	org
Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat	100	160	260	org
Jumlah Anak Jalanan	128	127	255	org
Jumlah Anak Terlantar	779	806	1585	org
Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT)	0	1	1	org

Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagai Pelaku (AKH)				org
Jumlah AKH Yang Diselesaikan Dengan Restoratif Justice				org
Jumlah LKSA			58	Unit
Jumlah Anak Yang Berada Dalam Panti Asuhan (Milik Pemerintah)	0	0	0	org
Jumlah Anak Yang Berada Dalam Panti Asuhan (Milik Masyarakat)	1141	1209	2350	org
Jumlah Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	598	513	1111	org
Jumlah Anak Dengan Disabilitas Fisik : Tubuh (Tuna Daksa)	24	38	62	org
Jumlah Anak Dengan Disabilitas Fisik : Mata (Tuna Netra)	9	12	21	org
Jumlah Anak Dengan Disabilitas Fisik : Rungu / Wicara (Bisu Tuli)	117	75	192	org
Anak Dengan Disabilitas Mental : Mental Retardasi (Tuna Grahita)	76	64	140	org
Anak Dengan Disabilitas Mental : Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	13	10	23	org
Anak Dengan Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	1	1	2	org

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2021

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Ada 2.921 orang laki-laki dan 2.790 orang perempuan yang berstatus penyandang disabilitas.

Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi (Undang-undang No. 14 tahun 2019). Menurut international Federation of Social Workers (IFSW), pekerja sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan dan pembebasan orang. Ada 100 orang laki-laki dan 160 orang perempuan yang berstatus sebagai pekerja sosial. Jumlah pekerja sosial lebih banyak perempuan daripada laki-laki karena sifat feminim yang dimiliki perempuan lebih luwes dalam melakukan pekerjaan sosial.

6. BIDANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

A. Perempuan dan Kekerasan

Salah satu yang membuat tindakan kekerasan pada perempuan masih menjamur adalah adanya nilai-nilai yang diyakini masyarakat yakni perihal budaya patriarki. Budaya patriarki ini menempatkan laki-laki sebagai pihak superior sehingga ia dapat menguasai dan mengontrol perempuan. Dengan kata lain, budaya ini menempatkan perempuan tersubordinasi atau menjadi orang nomor dua. Selain itu, didukung pula dengan adanya stereotype gender yang menganggap perempuan lemah dan laki-laki selalu kuat.

Hal ini tampak dari data kekerasan di Kota Semarang, ada 170 kasus, dimana korban laki-laki sebanyak 15 orang sedangkan korban perempuan sebanyak 155 orang, jumlah korban kekerasan lebih banyak perempuan daripada laki-laki.

Uraian	L	P	Jumlah
Jumlah Korban Kekerasan : Dewasa dan Anak	15	155	170
Jumlah Korban Dewasa (18 th keatas)	0	92	92
Jumlah Korban Anak (dibawah 18 th)	15	63	70
Jumlah Kasus KDRT	84	11	95
Jumlah Korban Penyandang Disabilitas : Dewasa	0	0	0
Jumlah Korban Penyandang Disabilitas : Anak	0	0	0
Jumlah Korban Dewasa dan Anak Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Fisik	4	54	56
Jumlah Korban Dewasa dan Anak Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Psikis	3	35	38
Jumlah Korban Dewasa dan Anak Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Seksual	2	44	46
Jumlah Korban Dewasa dan Anak Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Penelantaran	6	9	15
Jumlah Korban Dewasa dan Anak Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan : Trafficking	0	9	9
Jumlah Korban Dewasa dan Anak Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Eksploitasi	0	4	4
Jumlah Korban Dewasa dan Anak Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Lainnya	0	2	2
Jumlah Korban Dewasa Menurut Usia : Usia 18-24 Tahun	0	22	22
Jumlah Korban Dewasa Menurut Usia : Usia 25 - 44 Tahun	0	59	59
Jumlah Korban Dewasa Menurut Usia : Usia 45 - 59 Tahun	0	11	11

Jumlah Korban Dewasa Menurut Usia : Usia 60 Tahun +	0	0	0
Jumlah Korban Dewasa Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Fisik	0	46	46
Jumlah Korban Dewasa Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Psikis	0	26	26
Jumlah Korban Dewasa Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Seksual	0	11	11
Jumlah Korban Dewasa Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Penelantaran	0	7	7
Jumlah Korban Anak Menurut Jenis Kekerasan : Trafficking	0	0	0
Jumlah Korban Dewasa Menurut Jenis Kekerasan : Eksploitasi	0	0	0
Jumlah Korban Dewasa Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Lainnya	0	2	2
Jumlah Korban Anak Menurut Usia : 0 - 5 Tahun	3	5	8
Jumlah Korban Anak Menurut Usia : 6 - 12 Tahun	8	16	24
Jumlah Korban Anak Menurut Usia : 13 - 17 Tahun	4	42	46
Jumlah Korban Anak Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Fisik	4	6	10
Jumlah Korban Anak Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Psikis	3	9	12
Jumlah Korban Anak Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Seksual	2	33	35
Jumlah Korban Anak Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Penelantaran	6	2	8
Jumlah Korban Anak Menurut Jenis Kekerasan : Trafficking	0	9	9
Jumlah Korban Anak Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Eksploitasi	0	4	4
Jumlah Korban Anak Menurut Jenis Kekerasan : Kekerasan Lainnya	0	0	0
Jumlah Tenaga Yang Terlatih Untuk Pelayanan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan : Tenaga Pengaduan	0	20	20
Jumlah Lembaga Yang Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A Tingkat Kab, WCC, LSM, Dll)			4
Jumlah Lembaga Yang Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A Tingkat Kecamatan)			16
Jumlah Lembaga Yang Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A Tingkat Desa/Kelurahan)			78
Jumlah Tenaga Yang Terlatih Untuk Pelayanan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan : Bantuan Hukum	-	1	1

Sumber : DP3A, 2021

Kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga termasuk kasus yang tinggi jumlahnya. Padahal tentang kekerasan dalam rumah tangga ini sudah diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kekerasan dalam rumahtangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Data korban kekerasan berdasar pekerjaan termasuk pekerjaan sebagai ibu rumahtangga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel
Korban Kekerasan Berdasarkan Pekerjaan
Tahun 2021

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Bekerja	13
2	Pelajar	57
3	Ibu Rumah Tangga	33
4	Swasta	35
5	Pedagang/Tani/Nelayan	5
6	Tidak Bekerja	31
7	Buruh	1
8	PNS/TNI/POLRI	-

Sumber : ASIKK PAK - DP3A Kota Semarang, 2021

Data diatas menunjukkan bahwa korban kekerasan terbanyak ada di tingkat pelajar/masih berstatus anak yaitu sebanyak 57 kasus; sektor swasta ada 35 orang dan ibu rumah tangga ada 33 orang.

Sedangkan kasus berdasar jenis kasus terbanyak ada di ranah KDRT dengan jumlah 12 kasus. Data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel
Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Kasus
Tahun 2021

No	Kasus	Jumlah
1	KTA	11
2	KDRT	12
3	ABH	0
4	KDP	2
5	KTP	2
6	Trafficing	0

Sumber : ASIKK PAK - DP3A Kota Semarang, 2021

Korban kekerasan berdasar status perkawinan menunjukkan bahwa ada 78 pasangan menikah yang mengalami kekerasan. Yang mengalami kekerasan dengan status cerai ada 5 orang dan yang belum kawin ada 92 orang.

Tabel
Jumlah Korban Kekerasan Berdasar Status Perkawinan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Kawin	78
2	Cerai	5
3	Belum kawin	92

Sumber : ASIKK PAK - DP3A Kota Semarang, 2021

B. Perempuan dan Narkoba

Menurut data BNN penyalahgunaan narkoba pada perempuan yang terjadi di Kota Semarang, dengan data sebagai penyalahguna narkoba (pasien Rehabilitasi) :

Tabel
Penyalahgunaan Narkoba
Tahun 2021

No	Penyalahgunaan narkoba	Jumlah
1	Perempuan < 18 th	1 orang
2	Perempuan > 18 th	4 orang
3	Pelaku narkoba	Nihil

Sumber : BNN Prov Jateng, 2021

Beberapa program pendampingan pascarehabilitasi dilakukan oleh BNN Prov Jateng sebagai usaha untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba pada perempuan dan anak, yaitu :

1. Evaluasi perkembangan klien, berupa pengukuran kualitas hidup klien (WHOQoL) dan form Urica (tahap kesiapan perubahan klien)
2. Urine Test pada klien
3. Home Visit : menilai lingkungan, fisik, sosial klien.

Sedangkan bentuk program kerjasama dengan pihak lain juga dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Tengah di wilayah Kota Semarang, yaitu :

1. Perjanjian Kerja Sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dalam peran memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan di wilayah pesisir Jawa Tengah.
2. Perjanjian Kerja Sama dengan SMA Negeri 8 Semarang tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika melalui SMA Negeri 8 Semarang Bersih Narkoba (SMANDELA BERSINAR).

BAB V

KESIMPULAN

A. Bidang Kesehatan

1. Adanya kasus kematian ibu melahirkan 9 orang dan ibu nifas 12 orang.
2. Terdapat 133 kematian bayi dan 153 kematian balita.
3. Tingginya kasus stunting pada anak yaitu 1.367 anak, gizi buruk 37 anak, gizi kurang 891 anak, gizi lebih 859 anak.
4. Angka umnet need peserta KB sebesar 11,49%.

B. Bidang Pendidikan

1. Jumlah guru berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki dengan komposisi 12.045 orang perempuan dan 5.520 orang laki-laki
2. Sedangkan jumlah anak didik hampir sebanding dengan jumlah anak didik laki-laki berjumlah 156.508 orang dan 147.235 orang.

C. Bidang Ekonomi dan Tenaga Kerja

1. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan yaitu 10,01% laki-laki dan 8,94% perempuan. Bisa dikatakan perempuan memiliki alasan karena status pekerjaannya adalah ibu rumah tangga
2. Status pekerjaan utama menunjukkan bahwa penduduk yang berstatus buruh/karyawan/pegawai memiliki persentase tertinggi yaitu 61,14%; berusaha sendiri sebesar 17,47% dan pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 6,95%.
3. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 601.209 orang (64,23%) sedangkan pekerja di kegiatan informal sebanyak 334.867 orang (35,77%)
4. Pada Agustus 2021, penangguran laki-laki mencapai 10.01%, sementara perempuan mencapai 8.94%.sedangkan penangguran yang dialami oleh laki-laki mencapai 10.08% dan perempuan 8.94%.
5. terdapat tenaga kerja laki-laki sebanyak 1.680 orang dan tenaga kerja perempuan sebanyak 330 orang di sektor UMKM yang berjumlah 11.901 UMKM.

D. Bidang Politik dan Pengambil Keputusan

1. Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD ada 9 orang dari 47 anggota DPRD Kota Semarang, dalam artian keterwakilan perempuan dalam mengambil kebijakan di pemerintahan belum mencapai 30% atau sekitar 20% dari total jumlah anggota DPRD saat ini.
2. Dari 9.277 orang ASN, terdapat 3.749 laki-laki dan 5.528 perempuan. Hal ini menunjukkan adanya dominasi perempuan dari laki-laki di ranah ASN Kota Semarang.

E. Bidang Sosial Budaya

1. Jumlah PMKS di Kota Semarang menunjukkan jumlah 213.749 orang laki-laki dan 194.337 orang perempuan yang artinya yang berstatus PMKS lebih banyak laki-laki daripada perempuan.
2. Ada 2.921 orang laki-laki dan 2.790 orang perempuan yang berstatus penyandang disabilitas.
3. Ada 100 orang laki-laki dan 160 orang perempuan yang berstatus sebagai pekerja sosial

F. Bidang Kekerasan Terhadap Perempuan

1. Data kekerasan di Kota Semarang, ada 170 kasus, dimana korban laki-laki sebanyak 15 orang sedangkan korban perempuan sebanyak 155 orang, jumlah korban kekerasan lebih banyak perempuan daripada laki-laki.
2. Korban kekerasan terbanyak ada di tingkat pelajar/masih berstatus anak yaitu sebanyak 57 kasus; sektor swasta ada 35 orang dan ibu rumah tangga ada 33 orang.
3. Jenis kasus terbanyak ada di ranah KDRT dengan jumlah 12 kasus
4. Kasus terkait dengan penyalahgunaan narkoba menunjukkan ada 1 orang perempuan berumur <18 th, 4 orang perempuan berumur >18 th. Dan tidak ada pelaku narkoba berjenis kelamin perempuan.

Lampiran : Jumlah Guru di Kota Semarang Tahun Ajaran 2021/2022

No	Wilayah	Total			TK			KB			TPA			SPS			PKBM			SKB		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Semarang Barat	1,703	526	1,177	152	3	149	41	2	39	1	0	1	20	0	20	6	2	4	0	0	0
2	Kec. Pedurungan	1,681	419	1,262	208	3	205	65	1	64	16	1	15	66	0	66	16	5	11	0	0	0
3	Kec. Banyumanik	1,61	497	1,113	176	4	172	50	1	49	1	0	1	54	0	54	42	18	24	0	0	0
4	Kec. Semarang Selatan	1,474	543	931	89	0	89	27	1	26	2	1	1	16	0	16	5	1	4	0	0	0
5	Kec. Semarang Tengah	1,455	525	930	79	0	79	22	1	21	3	0	3	12	0	12	6	5	1	0	0	0
6	Kec. Tembalang	1,333	369	964	154	4	150	65	2	63	9	0	9	107	0	107	1	0	1	0	0	0
7	Kec. Semarang Timur	1,128	402	726	69	1	68	16	0	16	5	0	5	20	0	20	14	10	4	0	0	0
8	Kec. Ngaliyan	985	301	684	128	3	125	38	0	38	7	0	7	30	1	29	13	4	9	0	0	0
9	Kec. Mijen	970	312	658	87	0	87	25	0	25	2	0	2	22	0	22	0	0	0	0	0	0
10	Kec. Gunung Pati	909	270	639	70	0	70	41	0	41	1	0	1	43	0	43	11	4	7	19	5	14
11	Kec. Genuk	878	272	606	79	1	78	18	0	18	2	0	2	68	2	66	48	21	27	0	0	0
12	Kec. Candisari	803	241	562	84	0	84	13	0	13	0	0	0	11	0	11	17	4	13	0	0	0
13	Kec. Semarang Utara	784	268	516	77	0	77	21	1	20	0	0	0	27	1	26	19	7	12	0	0	0
14	Kec. Gajah Mungkur	764	212	552	87	1	86	17	0	17	6	0	6	26	0	26	26	3	23	0	0	0
15	Kec. Gayamsari	709	220	489	47	0	47	9	0	9	0	0	0	26	1	25	0	0	0	0	0	0
16	Kec. Tugu	379	143	236	25	1	24	8	0	8	0	0	0	20	0	20	14	3	11	0	0	0
Total	Total	17,565	5,52	12,045	1,611	21	1,59	476	9	467	55	2	53	568	5	563	238	87	151	19	5	14

No	Wilayah	SD			SMP			SMA			SMK			SLB		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Semarang Barat	724	204	520	369	144	225	273	127	146	110	42	68	7	2	5
2	Kec. Pedurungan	657	186	471	334	109	225	121	44	77	157	61	96	41	9	32
3	Kec. Banyumanik	602	196	406	332	122	210	211	88	123	137	68	69	5	0	5

4	Kec. Semarang Selatan	371	107	264	282	90	192	240	114	126	442	229	213	0	0	0
5	Kec. Semarang Tengah	412	136	276	370	145	225	230	109	121	253	106	147	68	23	45
6	Kec. Tembalang	504	162	342	271	109	162	53	23	30	55	29	26	114	40	74
7	Kec. Semarang Timur	379	122	257	197	67	130	68	30	38	360	172	188	0	0	0
8	Kec. Ngaliyan	452	159	293	133	57	76	101	40	61	83	37	46	0	0	0
9	Kec. Mijen	407	131	276	225	89	136	110	43	67	92	49	43	0	0	0
10	Kec. Gunung Pati	341	98	243	204	76	128	117	58	59	62	29	33	0	0	0
11	Kec. Genuk	354	114	240	170	71	99	70	32	38	69	31	38	0	0	0
12	Kec. Candisari	377	107	270	175	64	111	39	16	23	81	48	33	6	2	4
13	Kec. Semarang Utara	349	113	236	94	32	62	63	24	39	127	86	41	7	4	3
14	Kec. Gajah Mungkur	281	82	199	158	58	100	84	38	46	79	30	49	0	0	0
15	Kec. Gayamsari	254	65	189	141	50	91	54	31	23	178	73	105	0	0	0
16	Kec. Tugu	122	40	82	99	44	55	37	20	17	54	35	19	0	0	0
Total	Total	6,586	2,022	4,564	3,554	1,327	2,227	1,871	837	1,034	2,339	1,125	1,214	248	80	168

Lampiran : Jumlah Anak Didik di Kota Semarang Tahun Ajaran 2021/2022

No	Wilayah	Total			TK			KB			TPA			SPS			PKBM			SKB		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Pedurungan	28,889	14,473	14,416	3,854	2,013	1,841	550	285	265	83	47	36	447	211	236	253	140	113	0	0	0
2	Kec. Banyumanik	27,305	14,085	13,22	2,581	1,337	1,244	392	201	191	12	6	6	347	176	171	307	187	120	0	0	0
3	Kec. Semarang Selatan	27,007	13,903	13,104	1,16	574	586	151	79	72	5	4	1	71	34	37	19	10	9	0	0	0
4	Kec. Semarang Barat	26,739	13,691	13,048	2,677	1,412	1,265	341	167	174	9	3	6	184	96	88	0	0	0	0	0	0
5	Kec. Semarang Tengah	22,752	11,726	11,026	1,145	592	553	145	77	68	1	1	0	187	88	99	46	25	21	0	0	0
6	Kec. Tembalang	22,705	11,847	10,858	2,948	1,558	1,39	547	279	268	55	26	29	880	416	464	287	173	114	0	0	0
7	Kec. Semarang Timur	20,711	10,269	10,442	1,509	758	751	111	51	60	41	21	20	229	116	113	318	224	94	0	0	0
8	Kec. Mijen	18,449	9,583	8,866	1,667	860	807	250	138	112	33	19	14	344	166	178	104	81	23	0	0	0

9	Kec. Ngaliyan	17,416	8,694	8,722	1,954	1,017	937	270	136	134	9	8	1	300	144	156	123	79	44	0	0	0
10	Kec. Genuk	17,392	8,858	8,534	1,827	964	863	213	104	109	35	20	15	873	418	455	1,456	769	687	0	0	0
11	Kec. Gunung Pati	14,634	7,489	7,145	1,228	633	595	482	245	237	0	0	0	529	263	266	56	28	28	298	167	131
12	Kec. Semarang Utara	14,446	7,826	6,62	1,787	914	873	276	142	134	0	0	0	471	222	249	285	182	103	0	0	0
13	Kec. Candisari	12,816	6,858	5,958	1,298	649	649	142	82	60	0	0	0	102	60	42	109	61	48	0	0	0
14	Kec. Gayamsari	12,799	6,761	6,038	1,081	560	521	44	23	21	0	0	0	157	71	86	0	0	0	0	0	0
15	Kec. Gajah Mungkur	12,555	6,548	6,007	1,392	703	689	73	42	31	34	20	14	194	97	97	133	95	38	0	0	0
16	Kec. Tugu	7,128	3,897	3,231	473	255	218	104	51	53	0	0	0	258	115	143	144	88	56	0	0	0
Tot al	Total	303,743	156,508	147,235	28,581	14,799	13,782	4,091	2,102	1,989	317	175	142	5,573	2,693	2,88	3,64	2,142	1,498	298	167	131

No	Wilayah	SD			SMP			SMA			SMK			SLB		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Pedurungan	13,893	7,111	6,782	5,876	2,913	2,963	1,746	764	982	1,987	866	1,121	200	123	77
2	Kec. Banyumanik	12,639	6,595	6,044	5,33	2,671	2,659	3,467	1,633	1,834	2,216	1,269	947	14	10	4
3	Kec. Semarang Selatan	7,164	3,681	3,483	5,607	2,771	2,836	4,531	2,105	2,426	8,299	4,645	3,654	0	0	0
4	Kec. Semarang Barat	12,881	6,664	6,217	6,135	3,09	3,045	3,386	1,567	1,819	1,112	683	429	14	9	5
5	Kec. Semarang Tengah	7,118	3,633	3,485	6,432	3,283	3,149	3,905	1,725	2,18	3,453	2,11	1,343	320	192	128
6	Kec. Tembalang	11,162	5,845	5,317	4,764	2,417	2,347	1,077	454	623	315	270	45	670	409	261
7	Kec. Semarang Timur	7,279	3,752	3,527	3,598	1,815	1,783	1,106	550	556	6,52	2,982	3,538	0	0	0
8	Kec. Mijen	8,384	4,324	4,06	4,121	2,072	2,049	1,816	755	1,061	1,73	1,168	562	0	0	0
9	Kec. Ngaliyan	9,118	4,661	4,457	2,571	1,285	1,286	2,149	876	1,273	922	488	434	0	0	0
10	Kec. Genuk	7,936	4,027	3,909	2,955	1,575	1,38	1,219	558	661	878	423	455	0	0	0
11	Kec. Gunung Pati	5,79	3,018	2,772	3,967	2,023	1,944	1,769	728	1,041	515	384	131	0	0	0
12	Kec. Semarang Utara	6,967	3,609	3,358	1,532	802	730	1,165	525	640	1,918	1,405	513	45	25	20
13	Kec. Candisari	6,842	3,518	3,324	2,889	1,439	1,45	507	237	270	882	783	99	45	29	16

14	Kec. Gayamsari	5,477	2,85	2,627	2,477	1,388	1,089	691	372	319	2,872	1,497	1,375	0	0	0
15	Kec. Gajah Mungkur	5,698	2,906	2,792	3,072	1,606	1,466	990	474	516	969	605	364	0	0	0
16	Kec. Tugu	2,293	1,189	1,104	1,744	877	867	754	379	375	1,358	943	415	0	0	0
Total	Total	130,641	67,383	63,258	63,07	32,027	31,043	30,278	13,702	16,576	35,946	20,521	15,425	1,308	797	511